

ORASI ILMIAH



PERTUMBUHAN DAN PERUBAHAN STRUKTUR PEREKONOMIAN PROVINSI RIAU

(Morphology of Growth of Riau Province)

Oleh
Dr. H.B. Isyandi, SE., MSc



**PERTUMBUHAN DAN PERUBAHAN
STRUKTUR PEREKONOMIAN
PROVINSI RIAU**
(Morphology of Growth of Riau Province)

Dr. H.B. Isyandi, SE., MSc

**Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi
Universitas Riau
Disampaikan pada Pengukuhan sebagai Guru Besar
Ilmu Ekonomi Pembangunan
15 Agustus 2009**

PIDATO ILMIAH

PERTUMBUHAN DAN PERUBAHAN STRUKTUR PEREKONOMIAN PROVINSI RIAU (Morphology of Growth of Riau Province)

Bismillahirrahmanirrahim,

Yth. Bapak Ketua dan Anggota Dewan Penyantun Universitas Riau,

Yth. Bapak Rektor/ Ketua Senat Universitas Riau,

Yth. Bapak Sekretaris Senat Universitas Riau, Para Guru besar dan
Anggota Senat Universitas Riau,

Yth. Para Pejabat Sipil, TNI dan Polri,

Yth. Para Pembantu Rektor, Para Dekan dan Ketua Lembaga, beserta
seluruh Civitas Akademika Universitas Riau,

Yth. Para Undangan dan hadirin lainnya,

Assalamu'Alaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh,

Para Undangan yang berbahagia;

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahuwataala, karena atas rakhmat, karunia dan ridho-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat wal affiat.

Selanjutnya perkenankan saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan Universitas, Para Guru Besar dan Dekan Fakultas Ekonomi atas kesempatan waktu dan peluang yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan Orasi Ilmiah dalam rangka Dies Natalis Universitas Riau ke-45 tahun 2007.

Dalam Orasi Ilmiah ini, saya akan mencoba mengemukakan hasil kajian teoritik dan hasil penelitian mengenai Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Perubahan Struktur Perekonomian Provinsi Riau

A. PENDAHULUAN : *Morphology of Growth*

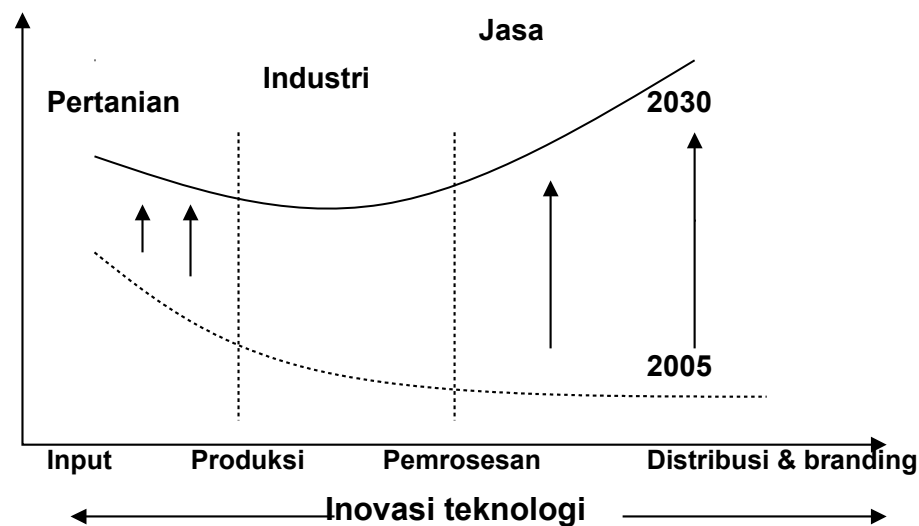
Hadirin yang saya hormati,

Pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh sebahagian besar negara disertai dengan perubahan struktur perekonomian. Perubahan struktur dimaksud adalah menurunnya kontribusi sektor pertanian dan meningkatnya kontribusi sektor industri, baik dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDB) maupun dari kesempatan kerja. Perubahan struktur perekonomian tersebut merupakan proses industrialisasi.

Dalam beberapa dasawarsa belakangan ini, perekonomian Indonesia telah mengalami perubahan yang mendasar. Arah kebijaksanaan pembangunan yang merupakan rangkaian pembangunan ekonomi adalah upaya untuk mewujudkan Indonesia yang modern, maju dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya (Visi Indonesia 2030), melalui pencapaian struktur ekonomi yang seimbang. Setidaknya, rangkaian tersebut telah terlihat pada era Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama 1969-1993 (Pelita-I sampai dengan Pelita V) yang sekarang dilanjutkan dengan era reformasi dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), yang mana Indonesia akan mencapai pendapatan per kapita sekitar US\$ 18 ribu dengan nilai PDB sebesar US\$ 5,1 triliun pada tahun 2030 (Indonesia Forum, 2007). Secara bertahap pemerintah berusaha untuk mengubah perekonomian yang bertumpu pada sektor pertanian dan pertambangan sebagai sektor primer ke arah struktur ekonomi yang lebih seimbang, yaitu industri manufaktur yang kuat yang didukung oleh sektor pertanian yang serasi (sebagaimana terlihat pada gambar 1).

Perubahan struktur perekonomian dapat dilihat dari pertumbuhan dan perubahan komposisi produk domestik bruto (PDB). Pertumbuhan dan perubahan komposisi PDB Indonesia menurut sektor utama kegiatan ekonomi menunjukkan perubahan yang mendasar. Peranan sektor industri manufaktur dalam produk nasional meningkat dari 11,14 persen

pada tahun 1983 menjadi 21,20 persen pada tahun 1993, bahkan meningkat menjadi 27,9 persen pada tahun 2008. (atas dasar harga konstan tahun 1983). Peranan sektor pertanian dalam periode yang sama telah menurun dari 42,96 persen menjadi 31,45 persen. Demikian juga halnya dengan perkembangan laju rata-rata pertumbuhan sektor industri adalah 12,13 persen, jauh melampaui laju pertumbuhan rata-rata sektor pertanian yang hanya 3,76 persen dalam periode 1983-1993 (BPS, Statistik Indonesia, berbagai penerbitan). Pada periode tahun 2001-2003, ekonomi hanya tumbuh rata-rata sebesar 4,2%, dan pertumbuhan ini terutama didorong oleh konsumsi masyarakat. Pertumbuhan ini jauh di bawah pertumbuhan ekonomi sebelum resesi yang rata-rata berkisar 7–8% per tahun. Investasi hanya tumbuh sebesar rata-rata 3,5% dan ekspor tumbuh sebesar rata-rata 2,1%. Padahal sebelum krisis, investasi dan ekspor masing-masing tumbuh sebesar rata-rata 10,4% dan 10%. Hal ini diantaranya disebabkan karena daya saing Indonesia mengalami penurunan.



Gambar 1 : Penciptaan nilai tambah di sektor Industri dan Jasa

Di sisi produksi, pertumbuhan industri pengolahan non-migas hanya tumbuh sebesar rata-rata 5,6%, jauh dibawah sebelum krisis yang mencapai 12,5%. Dalam kondisi ini, pengangguran terbuka dan jumlah

penduduk miskin mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Pengangguran meningkat menjadi 9,5 juta pada tahun 2003 dibandingkan dengan 4,2 juta pada tahun 1997. Jumlah penduduk miskin tercatat mencapai 36,1 juta jiwa atau 16,6% penduduk pada tahun 2004.

Tabel 1 : Perkembangan Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Indonesia, menurut Pulau, tahun 2007-2008.

Wilayah	Angka Kerja (juta orang)		Bekerja (juta orang)		Tingkat Pengangguran (%)	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008
Sumatra	21,7	22,6	19,7	20,8	8,9	8,0
Jabalnustra	64,2	63,9	58,6	58,7	8,6	8,1
Jawa (non Jakarta-Banten)	57,9	57,6	52,6	52,7	9,0	8,5
Bali-Nusa Tenggara	6,2	6,3	5,9	6,0	4,8	4,4
Jakarta-Banten	8,4	9,1	7,2	7,9	14,3	13,6
Kali-Sulampua	15,7	16,4	14,4	15,2	8,7	7,2
Kalimantan	6,1	6,4	5,7	6,0	7,5	6,8
Sulawesi	7,4	7,6	6,6	7,0	9,9	7,8
Maluku-Papua	2,2	2,4	2,1	2,2	7,6	6,7

Sumber : BPS (diolah)

Dari sisi pembangunan ekonomi, meskipun tidak meningkat secepat yang diharapkan, pertumbuhan ekonomi terus mengalami perkembangan. Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) tahun 2008 meningkat sebesar 6,1 persen terhadap tahun 2007, terjadi pada semua sektor ekonomi, dengan pertumbuhan tertinggi di sektor pengangkutan dan komunikasi 16,7 persen dan terendah di sektor pertambangan dan penggalian 0,5 persen. Pertumbuhan PDB tanda migas tahun 2008 mencapai 6,5 persen. Besaran PDB Indonesia pada tahun 2008 atas dasar harga berlaku mencapai Rp.4.954,0 trilyun, sedangkan atas dasar harga konstan tahun 2000 mencapai Rp.2.082,1 trilyun, sehingga PDB per kapita tahun 2008 mencapai Rp.21,7 juta (US\$2.271,2) jauh lebih besar dibanding tahun 2007 sebesar Rp.17,5 juta (US\$1.942,1).

Dari sisi penggunaan, PDB tahun 2008 digunakan untuk memenuhi konsumsi rumah tangga sebesar 61,0 persen, konsumsi pemerintah 8,4 persen, pembentukan modal tetap bruto atau investasi

fisik sebesar 27,7 persen, ekspor sebesar 29,8 persen dan impor sebesar 28,6 persen. Artinya, laju pertumbuhan ekonomi tahun 2008 sebesar 6,1 persen didukung oleh *sumber utama pertumbuhan* yakni ekspor 4,6 persen, konsumsi rumah tangga 3,1 persen, pembentukan modal tetap bruto 2,6 persen dan konsumsi pemerintah 0,8 persen.

Perekonomian Indonesia yang diukur berdasarkan besaran PDB atas dasar harga berlaku pada triwulan I-2009 mencapai Rp1.300,3 triliun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan 2000 besarnya mencapai Rp527,3 triliun. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2009 dibandingkan triwulan IV-2008, yang diukur dari kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat sebesar 1,6 persen (q-to-q). Pertumbuhan ini terjadi pada sektor pertanian, sektor listrik-gas-air bersih, sektor pengangkutan-komunikasi, sektor keuangan real-estat, jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa. Pertumbuhan tertinggi dihasilkan oleh sektor pertanian sebesar 19,3 persen, utamanya disebabkan oleh siklus panen raya tanaman padi tahunan yang terjadi pada Januari tahun 2009. PDB Indonesia pada triwulan I-2009 dibandingkan triwulan yang sama tahun 2008 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 4,4 persen. Pengeluaran konsumsi rumah tangga pada triwulan I-2009 dibandingkan dengan triwulan IV-2008 secara riil meningkat sebesar 0,8 persen, sedangkan pengeluaran konsumsi pemerintah menurun 28,7 persen, serta pembentukan modal tetap bruto turun 5,4 persen, demikian juga ekspor barang-jasa turun sebesar 17,2 persen dan komponen impor barang-jasa turun sebesar 18,6 persen. Komponen pengeluaran pada triwulan I-2009 dibandingkan triwulan yang sama tahun 2008 mengalami peningkatan, yakni: pengeluaran konsumsi rumah tangga naik sebesar 5,8 persen, pengeluaran konsumsi pemerintah 19,2 persen, dan pembentukan modal tetap bruto 3,5 persen. Sementara itu, kegiatan perdagangan luar negeri mengalami penurunan, ekspor barang dan jasa turun sebesar 19,1 persen, dan impor barang dan jasa turun sebesar 24,1 persen. Struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada triwulan I-

2009 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 58,3 persen, kemudian diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 23,4 persen, Pulau Kalimantan 9,4 persen, dan Pulau Sulawesi 4,3 persen dan sisanya 4,6 persen di pulau-pulau lainnya.

Tabel 2 : Struktur PDB Indonesia Menurut Lapangan Usaha Tahun 2007-2009 (persentase).

No	Lapangan Usaha	Tahun		
		2007	2008	Triw-I 2009
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	13,7	14,4	15,8
2.	Pertambangan dan Penggalian	11,2	11,0	8,8
3.	Industri Pengolahan	27,1	27,9	27,3
4.	Listrik, Gas, dan Air Bersih	0,9	0,8	0,9
5.	Konstruksi	7,7	8,4	9,6
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	14,9	14,0	13,4
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	6,7	6,3	6,6
8.	Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan	7,7	7,4	7,6
9.	Jasa-jasa	10,1	9,8	10,0
	PDB	100,0	100,0	100,0
	PDB Tanpa Migas	89,5	89,3	92,9

Sumber : BPS, berbagai tahun publikasi, diolah.

Proses perubahan struktur perekonomian Indonesia ini, tentunya tidak dapat dipisahkan dari peranan perekonomian Provinsi Riau. Hal ini karena Provinsi Riau memiliki sumber daya alam (migas) yang sangat potensial untuk dikembangkan. Potensi tersebut merupakan sektor unggulan daerah. Sumberdaya alam berupa migas maupun non migas merupakan stimulus pertumbuhan ekonomi. Produksi minyak bumi Provinsi Riau tahun 2005 sebanyak 166,22 juta barel. Di samping minyak mentah, sumber daya alam yang potensial lainnya adalah gambut, pasir, granit, batu bara (cadangan batubara tersebar di beberapa kabupaten seperti Kampar, Kuansing, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir). Selain potensi minyak bumi dan batu bara juga terdapat perkebunan. Luas perkebunan di Provinsi Riau tahun 2007 adalah 2.715.781 Ha dengan komoditi kelapa sawit seluas 1.611.382 Ha, kelapa seluas 550.022 Ha, karet 532.901 Ha, serta aneka tanaman seluas 19.276 Ha. Di sektor

industri terdapat industri kecil sebanyak 4.136 unit dan industri besar menengah sebanyak 400 unit (didominasi oleh crumb rubber, plywoods, pulp and paper, pengelolah CPO dan industri kapal).

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau selama kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami perkembangan yang cukup baik. Pertumbuhan tersebut didukung oleh kontribusi PDRB kabupaten/kota yang tergambar pada Tabel 3. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi provinsi lain di Sumatra, Provinsi Riau merupakan provinsi yang paling tinggi tingkat pertumbuhannya. Faktor inilah yang mendorong terjadinya proses industrilialisasi.

Tabel 3 : Kontribusi PDRB Kabupaten/ Kota ADH berlaku dengan Migas Provinsi Riau (2004-2008).

No	Kab/Kota	Tahun				
		2004	2005	2006	2007	2008
1	Kuansing		3,77	3,97	3,88	3,74
2	Inhil		4,33	4,51	4,55	4,44
3	Inhil		6,95	7,13	7,04	6,78
4	Pelalawan		4,97	4,98	4,86	4,67
5	Siak		16,24	15,78	16,12	16,49
6	Kampar		8,15	7,85	7,88	7,83
7	Rohul		3,92	3,91	3,73	3,41
8	Bengkalis		27,40	27,95	28,38	29,14
9	Rohil		11,21	11,03	11,10	11,12
10	Pekanbaru		10,03	9,92	9,57	9,13
11	Dumai		3,04	2,97	2,89	3,24
12	Total Kab/ Kota		100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS, Riau dalam Angka 2004-2009, *diolah*.

Pada sisi lain, gambaran di atas juga memberi makna bahwa kontribusi PDRB kabupaten/kota di Provinsi Riau selama 5 tahun terakhir masih didominasi oleh daerah penghasil sektor pertambangan yakni kabupaten Bengkalis, Siak dan Rokan Hilir. Ketiga kabupaten yang dikenal sebagai daerah penghasil migas tersebut pada tahun 2008 memberikan kontribusi masing-masing sebesar 29,14%, 16,49% dan 11,12 persen atau sebesar 56,75 persen dari total PDRB provinsi Riau, sedangkan sisanya sebesar 43,25 persen diberikan oleh 8(delapan) kabupaten/kota lainnya. Artinya, perekonomian Provinsi Riau digerakkan

oleh 3(tiga) kabupaten penghasil migas terbesar yakni sektor pertambangan dan penggalian, selain sektor pertanian dan industri pengolahan. Namun kabupaten/kota lainnya walaupun mempunyai kontribusi kecil terhadap PDRB provinsi Riau, tetap mempunyai peran dalam menunjang pembangunan ekonomi Provinsi Riau.

Tolok ukur peranan sektor industri dalam perkembangan struktur pada suatu perekonomian yang terpenting ialah : (a) besarnya sumbangan sektor industri (*manufacturing*) terhadap produk domestik regional bruto (PDRB), (b) jumlah tenaga kerja yang mampu diserap oleh sektor industri, (c) besarnya sumbangan produk sektor industri terhadap ekspor barang dan jasa. Berdasarkan standar perkembangan industri relatif yang disusun oleh badan PBB untuk pembangunan industri (UNIDO), peranan sektor industri dalam perkembangan struktur ekonomi negara-negara dapat digolongkan menjadi empat tahap, yaitu : (1) pertanian/non-industri (*agriculture*), (2) menuju proses industrialisasi (*industrializing*), (3) semi-industri (*semi-industrialized*), dan (4) industri penuh (*industrialized*) (Isyandi, 1996).

Pengalaman ekonomi di negara-negara maju mengungkapkan karakteristik tingkat perubahan struktural melekat pada proses pertumbuhan. Perubahan struktural tersebut merupakan pergeseran yang bergerak sedikit demi sedikit dari aktivitas pertanian ke industri dan kemudian ke sektor jasa. Dalam hal ini proses perkembangan ekonomi ditandai dengan adanya perubahan dalam kontribusi sektoral terhadap keluaran nasional sebagai akibat terjadinya pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri dan kemudian sektor jasa.

Dominannya sektor jasa *tingkat tinggi* dianggap sebagai tahap tertinggi dalam proses perkembangan ekonomi. Keadaan ini menyebabkan terjadinya suatu perubahan yang mendasar dalam skala dan atau ukuran rata-rata unit produksi. Selain itu, juga terjadi pergeseran lokasi dan status pekerjaan angkatan kerja dari pekerjaan sektor pertanian ke sektor industri manufaktur dan aktivitas jasa.

Untuk tercapainya keseimbangan antara sisi permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) baik barang dan jasa maupun tenaga kerja, diperlukan adanya keseimbangan antara pertumbuhan sektor industri dan pertanian. Sisi penawaran adalah pertumbuhan semua sektor yang saling berkaitan dan berfungsi meningkatkan penawaran barang dan jasa. Hal ini antara lain meliputi pertumbuhan bahan baku, barang setengah jadi, pertanian, pengairan, sumber energi, transportasi, serta industri yang memproduksi barang konsumen. Sisi permintaan berhubungan dengan penyediaan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan agar permintaan barang dan jasa dapat tumbuh (Isyandi, 1996). Oleh sebab itu, strategi pembangunan dan kebijakan pertumbuhan ekonomi yang dilaksanakan diarahkan agar dapat mengendalikan dan menciptakan pergeseran-pergeseran yang pada akhirnya menuju keserasian pertumbuhan antara sektor industri dan pertanian.

Sejalan dengan perubahan-perubahan nasional dalam memasuki era otonomi daerah, globalisasi dan internasionalisasi, perubahan struktur dan pertumbuhan sektoral perekonomian Provinsi Riau penting untuk dikaji (*Morphology of Growth of Riau Province*). Penelaahan tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Provinsi Riau ini, diperlukan untuk dapat menggambarkan perubahan struktur pada perekonomian Provinsi Riau.

B. KERANGKA PEMIKIRAN :

Potensi, Pertumbuhan dan Perubahan Struktur Ekonomi.

Hadirin yang saya hormati,

Pertumbuhan ekonomi berarti peningkatan keluaran. Pembangunan ekonomi menyatakan bukan hanya peningkatan keluaran tetapi juga penambahan jenis keluaran yang dapat diproduksi di samping adanya perubahan teknologi produksi dan kelembagaan serta pendidtribusinya (Suryana, 2000). Dengan demikian, pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menunjukkan/ memperlihatkan

beberapa setor tumbuh dengan lebih cepat dari sektor lainnya. Artinya proses pembangunan ekonomi mencakup perubahan komposisi produksi, perubahan pola alokasi sumber daya produksi di antara sektor-sektor kegiatan ekonomi, perubahan pola distribusi kekayaan dan perubahan kelembagaan dalam kehidupan masyarakat. Keadaan ini dinamakan *perubahan struktur ekonomi*.

Pertumbuhan ekonomi bukan hanya mencakup pembesaran faktor masukan yang akan mengakibatkan peningkatan pada keluaran, tetapi juga mencakup penambahan faktor masukan tersebut diiringi dengan efisiensi produksi yang lebih besar pula (kenaikan produktivitas (Suryana, 2000). Teori pertumbuhan ekonomi neo-klasik, biasanya hanya menjelaskan satu dua macam keluaran dan sejumlah masukan yang terbatas. Hubungan antara keluaran dan masukan ini adalah hubungan kuantitatif yang dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan matematis. Dengan demikian, model pertumbuhan ekonomi merupakan subyek yang dapat diukur dan diuji secara empiris.

Perubahan struktural pada hakikatnya menunjukkan bahwa selama pertumbuhan ekonomi berlangsung terjadi perbedaan dalam laju pertumbuhan produksi dari setiap sektor. Pada dasarnya kenaikan produksi suatu sektor dalam periode tertentu adalah sebagai akibat dari adanya peningkatan dalam kuantitas dan kualitas faktor produksi yang digunakan melalui perkembangan teknologi pada sektor tersebut. Hal ini juga berarti bahwa selama pertumbuhan ekonomi berlangsung, kecepatan perkembangan penggunaan faktor produksi dan perkembangan teknologi berbagai sektor umumnya bervariasi. Dengan demikian, selama pertumbuhan ekonomi berlangsung alokasi sumber daya ke berbagai sektor mengalami perubahan.

Di samping pertumbuhan ekonomi, diperkirakan perubahan dalam alokasi sumber daya ke berbagai sektor di suatu negara juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk, kekayaan alam, dan kebijaksanaan ekonomi negara yang bersangkutan. Oleh karena jumlah penduduk, kekayaan

alam dan kebijaksanaan ekonomi berbagai negara umumnya berbeda di antara satu dengan yang lain, pola perubahan struktur perekonomian selama pertumbuhan ekonomi di berbagai negara juga bervariasi.

Model pendekatan struktural menggunakan asumsi bahwa tidak semua sumber daya berhasil dialokasikan secara optimal sehingga terdapat berbagai ketidak seimbangan antar faktor produksi dalam setiap penggunaan yang berbeda. Dalam proses ini akan terjadi pergeseran alokasi sumber daya yang menimbulkan peningkatan keluaran dan produktivitas.

Pendekatan struktural mulai menarik perhatian para ahli ekonomi sejak setengah abad yang lalu. Penelitian tentang pertumbuhan dan perubahan struktural dirintis oleh Fisher (1935) Clark (1949), Lewis (1954), Kuznets (1966), dan Chenery dan Syrquin (1975). Hasil penelitian Fisher (1935) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi disertai dengan pergeseran permintaan dari sektor primer ke sektor sekunder dan akhirnya ke sektor tersier (Isyandi, 1996). Hal ini mengakibatkan perubahan dalam struktur produksi melalui pergeseran kesempatan kerja dan alokasi dana. Selanjutnya Clark (1949), juga melakukan pendekatan mengenai proses perkembangan ekonomi dan menyimpulkan bahwa makin tinggi pendapatan per kapita suatu negara, makin kecil peranan sektor pertanian dalam menyediakan kesempatan kerja. Sebaliknya, sektor industri makin penting peranannya dalam menampung tenaga kerja. Jadi dalam hal ini terdapat hubungan yang erat antara perubahan struktur produksi dengan struktur kesempatan kerja dicapai melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di setiap sektor atau bergesernya tenaga kerja dari sektor dengan produktivitas lebih rendah ke sektor dengan produktivitas lebih tinggi.

Era globalisasi dan liberalisasi ekonomi telah membawa pembaharuan yang sangat cepat dan berdampak luas bagi perekonomian, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional. Dampak yang paling dirasakan adalah semakin ketatnya persaingan di berbagai sektor

perekonomian. Untuk mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada agar mampu berkembang dalam arena persaingan seperti saat ini dan sekaligus menjadikannya sebagai motor penggerak perekonomian daerah di masa depan, maka potensi ekonomi yang ada harus mampu menjadi keunggulan daya saing daerah.

Tantangan utama dari pelaksanaan otonomi daerah dan pengembangan sektor riil adalah identifikasi dan pemahaman akan potensi ekonomi daerah. Secara makro, potensi ekonomi daerah biasanya juga menjadi salah satu indikator daya saing daerah tersebut. Hal itu karena potensi ekonomi suatu daerah akan ikut membentuk kompleksitas daya saing daerah. Oleh karena itu, dalam kajian ini kita membedakan antara konsep potensi ekonomi daerah dengan konsep daya saing daerah. Konsep potensi ekonomi daerah dipahami sebagai salah satu indikator daya saing daerah. Daya saing daerah sendiri mempunyai pengertian yang lebih luas daripada sekadar potensi ekonomi, karena dalam konsep daya saing daerah juga termasuk aspek kelembagaan, iklim sosial, iklim politik, kebijakan pemerintah, manajemen dan sebagainya.

Potensi ekonomi suatu daerah dengan daerah yang lain tidaklah sama, karena masing-masing daerah mempunyai ciri-ciri khas dan karakteristik yang menempel sesuai dengan sumberdaya manusia, struktur alam, dan letak geografisnya. Namun potensi ekonomi daerah tersebut merupakan modal dasar bagi pertumbuhan ekonomi, industri, investasi, penyerapan tenaga kerja, dan pangsa pasar bagi produk-produk industri, pertanian dan jasa. Potensi ekonomi suatu daerah juga akan menggambarkan kemampuan daerah tersebut dalam memacu pertumbuhan ekonomi, kemampuannya dalam penyerapan investasi, tenaga kerja, barang, jasa, dan tabungan.

Selain potensi yang menyangkut kinerja sektor perekonomian, potensi ekonomi suatu daerah juga dapat diukur berdasarkan infrastruktur dan sumberdaya alam yang ada di daerah tersebut. Indikator ini menandai

ketersediaan modal fisik berupa infrastruktur, baik mengenai kuantitas dan kualitasnya dalam mendukung perekonomian daerah dan modal alamiah, serta kondisi geografis maupun kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang juga akan mendorong aktivitas perekonomian daerah. Demikian juga teknologi informasi yang maju juga merupakan infrastruktur yang akan mendukung aktivitas bisnis di daerah.

Selain itu, untuk mengukur potensi ekonomi suatu daerah biasanya juga menggunakan indikator ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dan sumberdaya manusia yang ada di daerah tersebut. Indikator Iptek digunakan untuk mengukur kemampuan daerah dalam penerapan Iptek dalam berbagai aktivitas ekonomi sehingga meningkatkan nilai tambah. Sebab, keunggulan kompetitif daerah dapat dibangun melalui aplikasi teknologi yang sudah ada secara efisien dan inovatif.

Indikator sumberdaya manusia juga merupakan potensi ekonomi suatu daerah. Indikator ini digunakan untuk mengukur ketersediaan dan kualitas sumberdaya manusia yang ada di daerah tersebut. Tersedianya angkatan kerja yang besar dan berkualitas akan meningkatkan potensi ekonomi daerah bersangkutan (Isyandi, 2005). Demikian juga dengan adanya kualitas hidup masyarakat yang tinggi di suatu daerah juga akan menjadi indikator potensi ekonomi daerah tersebut.

Indikator potensi ekonomi suatu daerah yang diukur berdasarkan pertumbuhan sektor perekonomian, biasanya dibagi ke dalam sembilan sektor yang terdapat dalam PDRB. Sembilan sektor tersebut adalah (1) sektor pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan dan perikanan; (2) sektor pertambangan dan penggalian; (3) sektor industri pengolahan; (4) sektor listrik, gas dan air bersih; (5) sektor bangunan; (6) sektor perdagangan, hotel dan restoran; (7) sektor pengangkutan dan komunikasi; (8) sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; (9) sektor jasa-jasa.

Untuk mengetahui potensi ekonomi suatu daerah berdasarkan sektor maka dihitung bagaimana dan seberapa besar sumbangan masing-

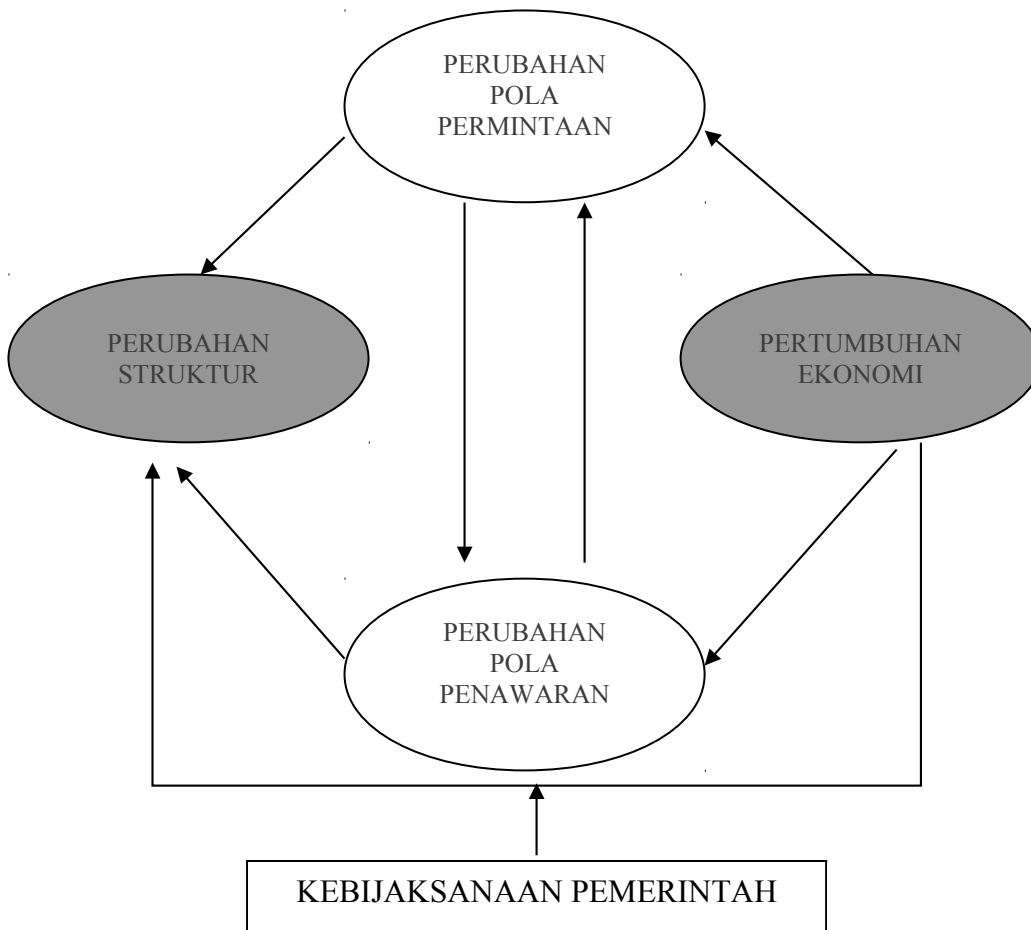
masing sektor tersebut terhadap PDRB dan kemampuan masing-masing sektor tersebut dalam menyerap tenaga kerja. Sektor yang mampu memberikan sumbangan terbesar dan sekaligus juga sebagai sektor yang dapat melakukan penyerapan tenaga kerja tertinggi, akan menjadi potensi ekonomi unggulan (ekonomi basis) daerah tersebut.

Pertumbuhan masing-masing sektor untuk tingkat provinsi tersebut juga menunjukkan adanya pertumbuhan untuk tingkat kabupaten/kota. Hanya saja analisis pertumbuhan berdasarkan sektor perekonomian itu belum mampu menunjukkan potensi ekonomi secara lebih spesifik yang ada pada suatu daerah. Karena, analisis tentang potensi ekonomi berdasarkan pertumbuhan sektor perekonomian tersebut biasanya baru menghasilkan sektor dan sub sektor yang menjadi ekonomi basis atau unggulan di suatu daerah. Jika dilakukan analisis berdasarkan data *time series* yang cukup panjang, sebenarnya dapat diperoleh sektor atau sub sektor yang benar-benar menjadi ekonomi basis (unggulan) suatu daerah, namun hal itu pun belum menunjukkan bidang usaha dan jenis produk yang menjadi potensi ekonomi daerah itu.

Dari sisi lain, analisisnya juga harus diturunkan ke tingkat bidang usaha dan jenis produk yang dihasilkan oleh sektor atau sub sektor usaha di daerah. Sehingga untuk sektor pertanian misalnya, akan diperoleh secara jelas tentang potensi ekonomi berdasarkan bidang usaha pertanian dan jenis produk pertanian yang menjadi unggulan dan layak dikembangkan lebih lanjut di daerah. Demikian juga halnya untuk sektor industri, perdagangan dan jasa, akan diketahui bidang usaha industri apa saja dan jenis produk industri apa saja yang menjadi potensi ekonomi di daerah itu. Sehingga pada akhirnya akan diketahui potensi bidang usaha dan jenis produk industri apa saja yang layak dikembangkan di daerah tersebut. Dengan demikian maka kebijakan dan program pembangunan yang akan diterapkan serta dikembangkan di daerah dapat lebih aplikatif dan tepat sasaran. Proses industrilialisasi tersebut sebagai mana terlihat pada Gambar 2.

PERUBAHAN STRUKTUR = f (PERTUMBUHAN EKONOMI)

- a. PERGESERAN POLA PERMINTAAN
- b. PERGESERAN POLA PENAWARAN



PERUBAHAN STRUKTUR = f (PERTUMBUHAN EKONOMI)
PERGESERAN PERMINTAAN = f (PERTUMBUHAN EKONOMI)
PERGESERAN PENAWARAN = f (PERTUMBUHAN EKONOMI)

Gambar 2 : Hubungan antara Perubahan Struktur dan Pertumbuhan Ekonomi (Isyandi, 1996)

Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam proses industrialisasi tersebut, yakni (a) konsep basis ekonomi daerah; (b) konsep basis sumberdaya; (c) konsep spesialisasi yang dapat dijelaskan sebagai berikut (Robinson Tarigan,2004 ; Richardson,2001; Sadono Sukirno, 2006; Hollis Chenery, 1979) :

1) Konsep Basis Ekonomi Daerah

Konsep basis ekonomi daerah memandang bahwa suatu daerah merupakan sebuah sistem sosial-ekonomi yang terpadu. Kemampuan suatu daerah untuk mengekspor produknya ke luar daerah (luar negeri) akan memicu tumbuhnya efek penggandaan (*multiplier effect*) di daerah itu sendiri. Teori basis ekonomi ini menganggap bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang-barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (*job creation*). Model ekonomi basis juga menekankan pendekatan sektoral terhadap pembangunan ekonomi suatu daerah. Pendekatan tersebut memusatkan perhatiannya terhadap transaksi dalam sistem perekonomian suatu daerah yang harus dimaksimalkan oleh perekonomian daerah melalui keterkaitan kelembagaan internal antara sektor publik dengan sektor swasta.

Menurut teori basis ekonomi, struktur perekonomian suatu daerah akan terdiri atas dua sektor, yaitu: *pertama*, sektor basis, yaitu sektor atau kegiatan ekonomi yang melayani baik pasar domestik maupun pasar luar daerah itu sendiri. Sektor ini sekaligus menunjukkan bahwa daerah secara tak langsung mempunyai kemampuan untuk mengekspor barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor tersebut ke daerah lain dan ini berarti bahwa sektor tersebut perlu dikembangkan dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi suatu daerah. *Kedua*, sektor non-basis, yaitu sektor atau kegiatan ekonomi yang hanya ditujukan untuk melayani pasar dalam daerah itu sendiri.

Richardson (2001) menjelaskan bahwa pertumbuhan suatu wilayah adalah fungsi dari penduduk dan tingkat pendapatan daerah belakangnya, sedangkan laju tingkat pertumbuhan tergantung pada laju tingkat permintaan dari daerah belakang atas barang dan jasa atau pelayanan di

daerah perkotaan. Teori lain yang menjelaskan tentang perkembangan daerah adalah teori sektor basis ekspor (*export base theory*). Teori ini dirancang untuk menjelaskan bagaimana suatu daerah (kota) tumbuh, dan kemudian mampu mendukung dan mempertahankan pertumbuhan daerahnya. Teori ini dikembangkan oleh banyak ahli. Menurut teori ini, ekonomi perkotaan terdiri atas aktifitas basis dan non basis. Aktifitas basis menghasilkan barang dan jasa untuk diekspor. Aktifitas non basis merupakan aktifitas yang menghasilkan barang dan jasa untuk dikonsumsi secara lokal. Aktifitas basis merupakan penentu dari pertumbuhan daerah atau perkotaan. Peningkatan dalam aktifitas basis akan mengakibatkan pertumbuhan pendapatan, lapangan kerja dan produksi. Sedangkan penurunan aktifitas basis akan mengakibatkan penurunan total aktifitas ekonomi dan lapangan kerja. Jadi pertumbuhan dari satu daerah perkotaan tergantung pada pertumbuhan aktifitas basisnya. Manfaat utama dari konsep basis ini adalah pada sifatnya yang simpel sehingga merupakan teknik yang berguna bagi analisis pendahuluan dan prediksi.

Teori basis dan non basis merupakan pengembangan dari teori perdagangan (*Comparative advantage*) dari Ricardo dan J.S. Mills, teori-teori lokasi dari Ohlin, Losch dan Isard yang digabungkan dengan teori perkembangan masyarakat (tradisional versus perkotaan) dan Hoyt (Robinson Tarigan, 2004). Teori tersebut menyebutkan daerah basis adalah daerah yang sudah berswasembada dalam memenuhi kebutuhannya sendiri dan disamping itu telah dapat pula mengirim barang, jasa-jasa, modal maupun tenaga ahli ke daerah lain, sehingga daerah basis sering disebut daerah surplus. Sebaliknya daerah yang belum dapat memenuhi kebutuhan sendiri dan masih mendatangkan barang, jasa-jasa, modal maupun tenaga ahli disebut daerah bukan basis atau sering disebut sebagai daerah minus, dimana kebutuhan daerah minus tersebut disubsidi oleh pemerintah.

2) Konsep Basis Sumberdaya

Pada dasarnya, teori basis sumber daya (*resource base theory*) merupakan perluasan dari teori basis ekonomi dan/atau teori basis ekspor. Dalam analisisnya, teori ini disamping mengakui peranan yang sangat besar dari perkembangan sektor ekspor suatu daerah dalam pembangunan daerah, baik dalam menciptakan pendapatan di sektor tersebut maupun dalam menciptakan efek penggandaan pada perekonomian daerah secara menyeluruh, teori ini juga menekankan analisisnya dalam dua aspek (Sadono Sukirno, 2006), yaitu:

- a) Pentingnya peranan kekayaan alam suatu daerah dalam pembangunan daerah tersebut dalam berbagai tingkat pembangunan ekonominya.
- b) Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya efek pengganda dari sektor ekspor secara menyeluruh pada perekonomian daerah.

Teori basis sumberdaya juga menganalisis mekanisme dari pertumbuhan suatu daerah. Menurut teori ini, pembangunan daerah pada mulanya timbul karena akibat adanya kesanggupan suatu daerah untuk menghasilkan barang-barang yang diperlukan oleh perekonomian nasional dan mengesportnya dengan harga dan kualitas yang bersaing dengan barang yang sama atau sejenis yang dihasilkan oleh daerah lain. Kesanggupan mengespor tersebut, selanjutnya akan menciptakan pendapatan untuk daerah itu sendiri berdasarkan karakteristik yang melekat pada perekonomian daerah serta struktur sosial daerah tersebut.

Dalam perkembangan selanjutnya, seiring dengan berkembangnya pasar daerah dan kegiatan ekonomi mampu menyediakan keperluan daerah, maka akan tercipta keadaan yang mendorong pertumbuhan daerah tangguh secara otomatis (*self-reinforcing*) dan berkembang secara otomatis (*self-sustaining*). Akibatnya, faktor-faktor dari dalam daerah itu menjadi bertambah penting peranannya dalam pembangunan ekonomi daerah. Selanjutnya, dengan adanya pertumbuhan yang berkembang

secara otomatis, maka terjadilah pergeseran dalam faktor yang mempengaruhi pertumbuhan daerah dari didominasi sektor ekspor menjadi lebih dipengaruhi oleh efisiensi organisasi produksi di daerah tersebut (Chenery,1979) .

3)Konsep Spesialisasi

Konsep spesialisasi dalam pembangunan regional merupakan suatu konsep pembangunan yang menunjukkan suatu tingkat spesialisasi relatif suatu sektor atau suatu daerah terhadap sektor atau daerah lain. Guna memberikan gambaran yang ideal mengenai tingkat spesialisasi suatu sektor perekonomian, maka dibutuhkan suatu alat analisis yang memadai. Salah satu alat analisis yang dimaksud adalah dengan menggunakan teknik analisis *location quation (LQ)*.

Teknik LQ merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat spesialisasi relatif suatu daerah dalam kategori industri atau sektor (Robinson Tarigan, 2004)). Selain itu pula teknik LQ ini juga merupakan suatu indikator sederhana yang menunjukkan kekuatan atau besar kecilnya peranan suatu sektor dalam suatu daerah dibandingkan dengan peranan sektor yang sama di daerah lain. Nilai LQ di suatu sektor pembangunan daerah lebih besar dari satu maka sektor yang bersangkutan merupakan sektor kuat, sehingga daerah tersebut secara potensial merupakan pengekspor produk dari sektor tersebut ke daerah lainnya. Sebaliknya bila nilai LQ kurang dari satu, maka daerah tersebut merupakan pengimpor produk sektor tertentu. Dalam aplikasinya teknik LQ dapat digunakan untuk menganalisis potensi perekonomian dari sisi pendapatan domestik dan dari sisi kesempatan kerja di suatu daerah.

C. GAMBARAN PERKEMBANGAN EKONOMI PROVINSI RIAU

Hadirin yang saya hormati,

1. Perkembangan Perekonomian

Pertumbuhan perekonomian propinsi Riau juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain : sumberdaya alam, penduduk, modal dan tidak kalah pentingnya adalah faktor lokasi termasuk struktur kegiatan ekonomi dan bisnis regionalnya. Di samping itu, stimulus jumlah (dana) pembangunan daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat secara signifikan juga berpengaruh terhadap perbedaan pendapatan dan jau pertumbuhan ekonomi daerah. Krisis ekonomi yang terjadi sejak tahun 1997 telah memberikan dampak yang luas terhadap perubahan ekonomi di propinsi Riau. Sebelum terjadinya krisis ekonomi, kegiatan ekonomi dan bisnis di propinsi Riau mengalami pertumbuhan yang tinggi, yakni 8,89 persen pada tahun 1996 dan 9,00 persen pada tahun 1997, selanjutnya mengalami kontraksi sebesar negatif 1,81 persen pada tahun 1998. Namun pada tahun 1999 pertumbuhan ekonomi propinsi Riau meningkat kembali menjadi 4,16 persen. Pada tahun 2000 dan 2001 pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau mengalami perkembangan sebesar 10,24 persen dan 5,15 persen. Selanjutnya pada tahun 2002, 2003 dan 2004 pertumbuhan ekonomi tanpa migas di propinsi Riau mengalami peningkatan berturut-turut sebesar 7,91 persen, 8,30 persen dan 8,95 persen. Untuk lebih jelasnya data ditampilkan pada Tabel 4.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau tanpa migas pada tahun 1998 sebesar minus 1,81% meningkat menjadi 5,59% pada tahun 2002, sehingga rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau per tahun selama periode 1998-2002 mencapai 4,67%, jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional per tahun yang hanya 0,05% pada periode yang sama. Begitu pula, pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau dengan migas pada tahun 1998 sebesar minus 3,86% tumbuh menjadi 4,40% pada tahun 2002. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau dengan migas per tahun selama periode 1998-2002 mencapai 2,94%. Kondisi ini jauh diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional per tahun yaitu minus 0,06% pada periode yang sama. Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi beberapa Provinsi tetangga pada periode yang sama,

pertumbuhan ekonomi Riau jauh lebih baik, seperti Sumatera Barat (tanpa migas) yang hanya tumbuh rata-rata sebesar 0,57% dan Sumatera Utara (tanpa migas) sebesar 0,54%.

Tabel 4 : Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2002-2008

Sektor	Laju Pertumbuhan						
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Pertanian	6,06	6,32	7,00	6,77	5,97	4,84	4,79
2. Pertambangan	12,47	21,51	34,07	3,71	2,91	-0,13	3,93
3. Industri	8,88	9,89	10,14	5,60	6,78	8,63	7,18
4. Listrik	4,66	4,00	10,44	9,20	5,86	5,62	6,86
5. Bangunan	9,57	8,21	9,10	7,15	8,27	11,65	11,14
6. Perdagangan	9,20	10,81	9,37	10,15	11,29	8,94	9,72
7. Angkutan	11,50	11,20	11,85	10,46	8,73	7,28	10,45
8. Keuangan	12,96	12,86	18,92	18,18	9,62	13,33	
9. Jasa-jasa	8,06	6,87	9,06	7,92	9,94	9,71	9,25
PDRB Tanpa Migas	7,91	8,30	8,95	8,54	8,66	8,25	8,06
PDRB Dengan Migas				5,41	5,15	3,41	5,65

Sumber: BPS Provinsi Riau, berbagai tahun penerbitan (2002-2009).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menciptakan kesempatan kerja yang tinggi pula. Faktor ini akan memberikan peluang yang dapat merangsang seseorang untuk memutuskan apakah akan berpartisipasi di pasar kerja. Namun disadari pula bahwa pembangunan yang pesat di samping akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga akan memberikan tekanan yang besar pada sumberdaya alam dan daya dukung lingkungan hidup. Tidak mustahil, sumberdaya alam dan lingkungan hidup akhirnya tidak mampu untuk memberikan kontribusinya dalam pembangunan, bahkan sebaliknya menjadi rusak dan hancur. Apabila sumberdaya alam dan lingkungan hidup sudah rusak, maka pertumbuhan ekonomi dan pembangunan juga akan menurun drastis. Kebijakan pembangunan ekonomi yang berkesinambungan adalah pilihan yang tepat untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi daerah.

Di samping itu, PDRB propinsi Riau merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang timbul akibat adanya berbagai aktivitas ekonomi dan bisnis. Pada Tabel 5 disajikan PDRB Provinsi Riau Tahun 2004-2009 berdasarkan harga konstan Tahun 2000.

Tabel 5 : Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tanpa Migas Tahun 2004 – 2008 (Dalam Jutaan Rupiah)

Lapangan Usaha	2004	2005	2006	2007	2008
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan	12.464.887,42	13,308,660.62	14,103,047.84	14,785,911.40	15,494,292.46
2. Pertambangan & Penggalian	316.532,74	43,906,875.82	45183667.56	45,125,692.40	46,897,464.66
3. Industri Pengolahan	5.230.451,01	7,972,127.07	8,512,386.69	9,246,973.72	9,910,769.31
4. Listrik, Gas dan Air minum	135.714,73	165,499.00	175,200.34	185,050.79	197,745.09
5. Bangunan	1.987.673,82	2,212,679.83	2,395,732.42	2,674,930.31	2,972,880.21
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	5.121.976,81	5,641,815.35	6,278,665.89	6,840,260.85	7,504,882.30
7. Pengangkutan & Komunikasi	1.794.891,88	1,982,655.81	2,173,442.62	2,331,648.28	2,575,353.68
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	653.130,59	771,841.96	892,826.69	1,011,841.54	1,149,980.23
9. Jasa-Jasa	3.081.363,13	3,325,431.29	3,655,897.19	4,010,950.18	4,382,013.88
PDRB	30.786.622,12	33,516,541.66	36,417,633.12	39,420,760.09	42,596,930.48

Sumber : BPS Provinsi Riau, Riau Dalam Angka, berbagai tahun penerbitan, diolah.

Angka-angka dalam PDRB propinsi Riau di atas, menggambarkan kemampuan daerah ini dalam mengelola sumberdaya alam dan sumberdaya manusia serta teknologi yang dimilikinya. Oleh sebab itu PDRB yang dihasilkan oleh propinsi Riau sangat tergantung pada potensi sumberdaya alam yang ada, ketersediaan tenaga terdidik, optimalisasi penggunaan barang-barang modal serta dana yang tersedia dalam menciptakan produksi barang dan jasa. Adanya keterbatasan kemampuan dalam mengelola faktor-faktor tersebut di atas akan

menyebabkan lambatnya pembangunan ekonomi, tingginya tingkat pengangguran dan membesarnya penduduk miskin di propinsi Riau.

Perkembangan PDRB propinsi Riau tanpa migas atas dasar harga konstan Tahun 2000 yang dikaitkan dengan jumlah investasi dan ekspor sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 2003 dapat dilihat pada Tabel-6 dibawah ini.

Tabel 6 : Perkembangan PDRB, Investasi Dan Ekspor Di Provinsi Riau Tanpa Migas Tahun 1980-2003

TAHUN	PDRB (Juta Rp)	PMA (RibU USD)	PMDN (Juta Rupiah)	EKSPOR (RibU USD)
1980	231,803.50	4,351,875.00	52,031,129.73	7,936,372.60
1985	1,071,509.33	14,249,717.00	128,148,224.00	4,816,693.60
1990	1,572,292.40	20,515.00	5,736,112.80	5,185,528,20
1995	7,211,638.71	5,205,491.89	4,669,466.24	7,360,464,80
2000	9,649.875,59	2,391,545.40	8,454,421.39	11.012.225,22
2001	10.146.823,25	2,354,204.00	5.740.533.00	8.977.065,96
2002	10,714,356.29	1,395,358.90	2,799,092.00	9.306.856,60
2003	11.382.802,83	1,153,020,00	668,888.00	9.895.362,15

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, diolah, berbagai tahun penerbitan

Pada tahun 1980 jumlah PDRB propinsi Riau tanpa migas menurut lapangan usaha sebesar Rp.231.803,50 juta, dan pada tahun 1985, 1990 dan 1995 jumlah PDRB propinsi Riau secara berturut-turut mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp.1.071.509,33 juta; Rp.1.572.292,40 juta dan Rp.7.211.638,71 juta. Pada tahun 2000 jumlah PDRB Provinsi Riau kembali mengalami peningkatan yakni Rp.9.650.222,77 selanjutnya pada tahun 2003 telah berubah menjadi Rp.11.382.802,83 yang dihitung menurut harga konstan tahun 1993.

Krisis ekonomi telah menyebabkan terjadi perubahan struktural dalam perekonomian Provinsi Riau. Ekspor propinsi Riau tahun 1990 sebesar USD 5,185,528,20 ribu meningkat menjadi USD 11,012,225,22 ribu pada tahun 2000 namun turun menjadi USD 9,895.362,15 ribu pada

tahun 2003. Fluktuasi ini lebih cenderung disebabkan oleh akumulasi yang menyangkut proses permintaan sumberdaya produksi untuk meningkatkan kemampuan berproduksi. Hal ini menunjukkan hasil kemajuan yang berarti yang disebabkan oleh perubahan struktur ekonomi daerah dari sumbangan sektor industri terhadap PDRB :

Perkembangan jumlah investasi selama 25 tahun terakhir, Provinsi Riau menempati urutan nomor 5 di Indonesia untuk penanaman modal asing (PMA). Pada tahun 1990 PMA di Provinsi Riau tercatat sebesar USD 20.515 ribu, kemudian naik menjadi USD.2.391.545,40 ribu, selanjutnya pada tahun 2003 sebesar 1.153.020 ribu. Demikian juga dengan PMDN, pada tahun 1990 tercatat sebesar Rp.5.736.112,80 juta, kemudian naik menjadi Rp. 8.454.421,39 juta pada tahun 2000, sedangkan pada tahun 2003 turun menjadi 668.888 juta. Faktor-faktor ini menyebabkan pendapatan regional per kapita propinsi Riau, relatif cukup tinggi yaitu Rp.4.087.451,00 pada tahun 1999 meloncat menjadi Rp. 6.638.010,15 pada tahun 2004. Artinya, pada krisis ekonomi meningkatnya pendapatan per kapita masih juga ada, walaupun terserap oleh besar inflasi sehingga kemampuan daya beli menjadi turun drastis.

Neraca perdagangan luar negeri Provinsi Riau selama periode 2005-2007 mengalami surplus yang cenderung meningkat. Pada tahun 2005 surplus tersebut senilai US \$6.380,0 juta meningkat menjadi US \$8.032,7 juta pada tahun 2006, kemudian meningkat lagi sebesar 26,9% menjadi US \$10.190,9 juta pada tahun 2007. Surplus neraca perdagangan luar negeri yang biasanya terjadi lebih besar didukung oleh surplus komunitas migas, namun pada tahun 2007 surplus komoditas nonmigas justru lebih dominan. Senarnya, surplus non-migas tersebut telah meningkat sejak tahun 2005. Nilai surplus komunitas non-migas sebesar US \$3.698,3 juta pada tahun 2006 kemudian meningkat menjadi sebesar US \$ 5.502,2 juta atau 48,77 persen pada tahun 2007.

Bila diamati lebih dalam, ekspor Provinsi Riau tahun 2007 mengalami kenaikan sekitar 27,4 persen, yaitu dari US \$8.694,7 juta menjadi US

\$11.080,5 Juta sedangkan impor Provinsi Riau juga mengalami kenaikan sebesar 34,4 persen. Akan tetapi secara nominal impor tersebut hanya meningkat sebesar US \$227,6 juta, masih jauh lebih rendah dibanding ekspor yang secara nominal meningkat sebesar US \$ 2.385,8 juta. Selengkapnya dapat tergambar melalui tabel 7. Peningkatan tersebut diuaktu oleh peningkatan sebagian besar komoditasnya, namun dari sepuluh komoditas utama ekspor tahun 2007 yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan tersebut, tidak ada satupun komoditas yang berasal dari sektor primer (sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan dan sektor pertambangan dan penggalian)

Tabel 7 : Perdagangan Luar Negeri Riau, 2005-2007 (juta US\$)

Tahun	2005	2006*	2007
Ekspor	7.024,8	8.694,7	11.080,5
a. Migas	3.881,9	4.430,2	4.694,1
b. Non Migas	3.142,9	4.264,5	6.311,8
Impor	644,8	662,0	889,6
a. Migas	223,7	95,8	80,0
b. Non Migas	421,1	566,2	809,6
Surplus/defisit	6.380,0	8.037,7	10.190,9
a. Migas	3.658,2	4.334,4	4.614,1
b. Non Migas	2.721,8	3.698,3	5.502,2

Sumber : BPS, BAPPEDA Provinsi Riau, berbagai penerbitan (diolah).

Serangkaian faktor yang khusus melekat dalam perekonomian propinsi Riau antara lain: (a) Permintaan tenaga kerja meningkat dengan lebih pesat di kawasan kota, sedangkan penambahan tenaga kerja berlangsung di daerah pedesaan, (b) Kurang lancarnya mobilitas antar sektor dari tenaga kerja berkaitan dengan tingkat keterampilan atau pendidikan, (c) Selain dari itu juga tidak adanya akses yang sama untuk mendapatkan modal dan tanah yang baik, (d) Investasi dan penerapan teknologi diutamakan di bidang modern dalam masing-masing sektor.

Dalam menyelesaikan fenomena pembangunan provinsi Riau sebagaimana dijelaskan di atas, ilmu ekonomi pembangunan menawarkan teori top-down dan bottom up. Akan tetapi konsep pembangunan top-down dan bottom up tidaklah terlalu berhasil di NSB.

Sebagai alternatif dikembangkan suatu konsep pembangunan wilayah dengan pendekatan konsep *pembangunan ekonomi lokal* (*local economics development*) Konsep ini beranggapan bahwa pengembangan daerah sangat ditentukan oleh tumbuh kembangnya wiraswasta lokal yang ditopang oleh kelembagaan-kelembagaan di daerah tersebut meliputi : industri, universitas, asosiasi kegiatan usaha, pemerintah daerah, pengusaha lokal dan lainnya (Blakely, 1987, 13) Secara singkat, terdapat fenomena ganda yang tidak bisa dipisahkan dalam pengembangan daerah saat ini yaitu keterkaitan daerah dengan dinamika ekonomi global pada satu sisi dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam proses pembangunan wilayah pada sisi lain.

Local Economic Resource Development (LERD) diartikan sebagai penumbuhan suatu lokalitas secara sosial ekonomi dengan lebih mandiri, berdasarkan potensi-potensi yang dimilikinya, baik sumber daya alam, geografis, kelembagaan, kewiraswastaan, pendidikan tinggi, asosiasi profesi maupun lainnya (Firman, 1999) Konsep dasar LERD adalah suatu proses dimana pemerintah setempat (*local governments*) mengatur sumber-sumber daya setempat dan menciptakan pola kemitraan dengan sektor swasta atau sektor publik untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan merangsang aktivitas ekonomi pada suatu wilayah ekonomi (Blakely, 1989: 13). Berbeda dengan paradigma konvensional pengembangan daerah sebelumnya yang berorientasi pada output dan blue print, LERD cenderung berorientasi pada proses.

Secara lebih spesifik, LERD adalah bagaimana merumuskan proses pembangunan wilayah dengan melibatkan institusi pemerintah dan swasta, pengembangan industri alternatif peningkatan keterampilan dan inovasi tenaga kerja lokal, transfer pengetahuan dan identifikasi pasar-pasar baru (Blakely, 1989, 59). Pada sisi demand LERD berupaya meningkatkan jumlah dan variasi lapangan kerja sedangkan pada sisi supply berupaya memberikan kemampuan dan akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat lokal terhadap sumber-sumber ekonomi.

Dalam sistem kelembagaan pemerintah, LERD cenderung mendorong proses desentralisasi dengan memberikan otonomi. Dengan mempelajari basis ekonomi, mempelajari hambatan untuk tumbuh dan investasi, dan dengan merencanakan program dan proyek secara strategis untuk mengatasi hambatan dan memfasilitasi investasi, masyarakat dapat mengembangkan basis ekonomi dan memperluas lapangan pekerjaan di daerahnya. Untuk melihat potensi *capital social* di provinsi Riau, Tabel 8, memperlihatkan kinerja indikator sosial kependudukan provinsi Riau.

Tabel 8 : Indikator Sosial Kependudukan Provinsi Riau Tahun 2004-2008

No	Indikator	2004	2005	2006	2007	2008
1	Penduduk (total) :		4.938.900	4.953.000	5.071.000	5.189.100
	Laki-Laki		2.662.000	2.619.600	2.678.100	2.735.800
	Perempuan		2.273.900	2.333.400	2.392.900	2.453.300
2	Kepadatan Penduduk (jiwa/km)		54,24	55,56	56,88	58,21
3	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)			2,42	2,38	2,33
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,20	73,60	73,81	74,63	
5	Tingkat Pengangguran terbuka (%)	15,3	12,2	10,2	9,79	8,20
6	Penduduk Usia Kerja	3.384.397	4.176.923	3.312.427	3.380.689	3.584.090
7	Angkatan Kerja	2.390.600	2.530.789	1.975.684	2.115.084	2.239.388
8	Tingkat Kemiskinan (%)	14,67	12,51	11,86	11,20	10,63
9	Pendidikan :					
	Tidak Tamat SD	24,49	22,88	23,83	24,00	
	SD	30,43	33,77	30,67	29,60	
	SMP/ Sederajat	21,01	30,03	19,55	19,88	
	SMA/ Sederajat	20,92	19,35	21,92	21,40	
	Diploma III/ ke atas	3,15	3,96	4,03	5,38	

Sumber : BPS dan BAPPEDA Provinsi Riau 2009, diolah

D. TINJAUAN TEORITIS : PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PERUBAHAN STRUKTUR

Hadirin yang saya muliakan,

Pertumbuhan Seimbang dan Pertumbuhan Tidak Seimbang serta Indeks Ketidakseimbangan.

Sasaran yang hendak di capai melalui pelaksanaan pembangunan jangka panjang di bidang ekonomi adalah struktur ekonomi yang seimbang yang memperlihatkan kemampuan dan kekuatan industri maju yang didukung dengan kekuatan dan kemampuan pertanian yang serasi. Dalam mencapai struktur ekonomi yang seimbang tersebut diperlukan perubahan-perubahan fundamental dalam struktur ekonomi sehingga produksi yang berasal dari sektor-sektor di luar Pertanian merupakan bagian yang semakin besar karena sektor industri menjadi tulang punggung ekonomi. Struktur ekonomi yang kokoh dan keterkaitan yang meluas akan membuka kesempatan kerja, baik di sektor industri manufaktur maupun di sektor lainnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu strategi pembangunan dan kebijakan pertumbuhan ekonomi dalam mendorong dan mempercepat proses industrialisasi tersebut. Strategi pembangunan itu adalah pembangunan seimbang atau pembangunan tak seimbang.

Teori pertumbuhan seimbang mengharuskan adanya pembangunan yang serentak dan harmonis diberbagai sektor ekonomi sehingga semua sektor tumbuh bersama. Untuk itu, diperlukan keseimbangan antara sisi permintaan dan sisi penawaran. Sisi penawaran memberikan tekanan pada pembangunan serentak di semua sektor yang saling berkaitan dan berfungsi meningkatkan penawaran barang. Sisi permintaan berhubungan dengan penyediaan kesempatan kerja yang lebih besar dan peningkatan pendapatan agar permintaan barang dan jasa dapat tumbuh (Isyandi, 1996).

Pembangunan seimbang biasanya dilaksanakan dengan maksud untuk menjaga agar proses pertumbuhan tidak mengalami hambatan-hambatan dalam (a) memperoleh bahan baku, tenaga ahli, sumber` (air dan listrik) dan fasilitas-fasilitas untuk mengangkut hasil produksi ke pasar; (b) memperoleh pasar barang-barang yang telah dan akan diproduksi. Dengan demikian, pertumbuhan seimbang diartikan sebagai usaha pertumbuhan yang berupaya untuk mengatur program investasi

sedemikian rupa sehingga sepanjang proses pertumbuhan tidak akan timbul hambatan-hambatan yang bersumber dari penawaran atau permintaan.

Dalam melaksanakan pertumbuhan seimbang, tingkat investasi yang harus dilakukan besarnya jauh melebihi tingkat investasi yang dilakukan pada sebelum usaha pertumbuhan ekonomi dilakukan. Oleh karena itu, strategi pertumbuhan seimbang disebut pula big push theory. Tujuan utama strategi ini adalah untuk menciptakan berbagai jenis industri yang berkaitan erat satu sama lain sehingga setiap industri akan memperoleh eksternalitas ekonomi sebagai akibat dari industrialisasi tersebut. Jika suatu industri memperoleh eksternalitas ekonomi, biaya produksinya dapat diturunkan dan industri tersebut dapat melaksanakan kegiatannya dengan lebih efisien.

Menurut Rosenstein-Rodan (1953 dalam Sadono Sukirno, 2006), pembangunan industri secara besar-besaran akan menciptakan tiga macam eksternalitas ekonomi, yaitu (1) yang diakibatkan oleh perluasan pasar; (2) karena industri yang sama letaknya berdekatan; dan (3) karena adanya industri lain dalam perekonomian tersebut. Nurkse (1953) dalam analisisnya menekankan bahwa pembangunan ekonomi bukan saja mengalami kesukaran dalam mendapatkan modal yang dibutuhkan, tetapi juga dalam mendapatkan pasar bagi barang-barang industri yang dikembangkan. Nurkse mengatakan bahwa investasi yang sangat rendah disebabkan kecilnya daya beli masyarakat sedangkan rendahnya daya beli itu disebabkan oleh rendahnya pendapatan riil masyarakat dan keadaan ini disebabkan pula oleh rendahnya produktivitas.

Menurut Nurkse (1953), faktor yang terpenting dalam menentukan luasnya pasar adalah tingkat produktivitas. Untuk suatu perekonomian yang mempunyai sejumlah penduduk tertentu, jumlah barang-barang yang dapat dihasilkan dan dijual dalam jangka waktu tertentu tergantung kepada tingkat penggunaan modal dalam proses produksi. Dalam perekonomian yang pasarnya sangat terbatas tidak ada rangsangan bagi

pengusaha untuk menggunakan alat-alat yang modern. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pasar telah membatasi penggunaan modal sehingga membatasi pula kemampuan perekonomian untuk menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu konsep Nurkse mengenai keseimbangan menjelaskan bahwa perkembangan ekonomi dihitung melalui sejumlah perubahan Pada komposisi keluaran sektoral. Jumlah perubahan yang diperhitungkan itu akan diberikan oleh perbedaan-perbedaan sektoral dalam koefisien pendapatan seperti yang dijelaskan Chenery.

Lewis (1957) juga melengkapi analisisnya tentang perlunya pembangunan yang seimbang yang ditekankan Pada keuntungan yang akan diperoleh dari adanya saling ketergantungan yang efisien antara berbagai sektor, yaitu antara sektor pertanian dan sektor dustri, serta antara sektor dalam negeri dan luar negeri. lanjutnya, Lewis (1957) mengatakan bahwa akan timbul banyak salah jika usaha pembangunan hanya dipusatkan Pada satu sektor saja. Tanpa adanya keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor akan timbul adanya ketidak-stabilan dan gangguan terhadap kelancaran kegiatan ekonomi sehingga proses pembangunan terhambat.

Lewis (1957) juga menunjukkan pentingnya upaya pembangunan yang menjamin adanya keseimbangan antara sektor industri dan sektor pertanian. Jika di sektor pertanian terjadi inovasi dalam teknologi produksi bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan domestik, implikasinya yang mungkin timbul adalah (a) terdapat surplus di sektor pertanian yang dapat di jual di sektor non pertanian; (b) produksi tidak bertambah, berarti yang digunakan berkurang. Oleh sebab itu jumlah bertambah tinggi; (c) kombinasi dari kedua keadaan tersebut.

Jika sektor industri mengalami perkembangan yang pesat, sektor tersebut akan menyerap kelebihan produksi bahan pangan dan kelebihan tenaga kerja. Tanpa adanya perkembangan di sektor industri, nilai tukar (*terms of trade*) sektor pertanian akan memburuk sebagai akibat dari

kelebihan produksi. Hal ini akan menimbulkan akibat depresif terhadap pendapatan disektor pertanian. Oleh karena, itu di sektor pertanian tidak terdapat lagi perangsang untuk mengadakan investasi baru dan inovasi.

Menurut Hirschman, Streeten, Singer, dan Flaming, strategi pertumbuhan seimbang sangat sulit dilakukan di negara sedang berkembang yang biasanya mempunyai sumber daya yang terbatas. Hirschman menggolongkan Roesenstein-Rodan dan Nurkse pada teori pembangunan seimbang yang menekankan segi permintaan, Sedangkan Citovsky dan Lewis pada teori pembangunan seimbang yang menekankan segi penawaran.

Singer dan Fleming mengemukakan strategi pertumbuhan tak-seimbang. Pertumbuhan merupakan keadaan yang berlawanan dengan keadaan pada pertumbuhan seimbang. Istilah ini digunakan untuk menyatakan program pertumbuhan disusun sedemikian rupa sehingga dalam perekonomian tersebut akan timbul kelebihan (surplus) dan kekurangan (shortage) dalam berbagai sektor sehingga menimbulkan distorsi-distorsi dan ketidakstabilan dalam perekonomian.

Menurut Hirschman (1958, dalam Sadono Sukirno, 2006), strategi pertumbuhan seimbang melupakan kenyataan historis yang menunjukkan bahwa secara gradual kegiatan industri modern telah mulai berkembang pada masa lalu dan telah sanggup menggantikan industri rumah tangga atau menghasilkan barang-barang yang pada mulanya diimpor. Strategi ini juga mengabaikan kenyataan sejarah yang menunjukkan bahwa hasil industri modern dapat mengakibatkan kenaikan pengeluaran masyarakat sehingga mengurangi tabungan mereka serta mendorong untuk bekerja lebih giat. Hirschman tidak yakin bahwa negara sedang berkembang sanggup melaksanakan program pertumbuhan yang demikian tanpa adanya bantuan dari luar negeri. Karena pelaksanaan pembangunan seperti itu memerlukan modal dan tenaga ahli yang besar sekali jumlahnya. Hirschman juga menyatakan bahwa jika suatu negara mampu untuk melaksanakan pertumbuhan seimbang, negara itu bukan lagi

negara sedang berkembang. Oleh karena itu, Hirschman dan Streeten menawarkan strategi pertumbuhan takseimbang. Strategi pertumbuhan takseimbang adalah suatu pola pembangunan yang lebih cocok untuk mempercepat proses pertumbuhan di negara sedang berkembang. Hirschman menambahkan bahwa pola pertumbuhan takseimbang adalah berdasarkan pertimbangan (1) secara historis pertumbuhan ekonomi yang terjadi coraknya takseimbang; (2) untuk mempertinggi efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia; dan (3) pertumbuhan takseimbang akan menimbulkan ketidakseimbangan (bottlenecks) atau gangguan-gangguan dalam proses pertumbuhan yang akan menjadi pendorong bagi pertumbuhan selanjutnya.

Strategi pertumbuhan tak-seimbangan juga dianggap lebih sesuai untuk dilaksanakan di negara sedang berkembang karena menghadapi kekurangan sumber daya. Dengan melaksanakan strategi pertumbuhan takseimbang, usaha pembangunan pada periode tertentu dapat dipusatkan pada beberapa sektor yang akan mendorong investasi yang ikut (induced investment) di berbagai sektor pada periode berikutnya. Dengan demikian, sumber daya yang sangat langkayang tersedia dapat digunakan secara lebih efisien pada setiap tahap pembangunan.

Samuelson dan Solow (1953 dalam Jhingan, 1990)) membuat rumusan tentang pengertian pertumbuhan yang seimbang (balanced growth) dengan mengacu pada tingkat pertumbuhan sektoral. Rumusan ini mengemukakan bahwa.

The output of each commodity increases or decreases by a constant percentage per unit of time, the mutual proportion in which commodities are produced remaining constant. The economy changes only in scale, but not in composition (Solow and Samuelson, 1953)

Gagasan mengenai laju pertumbuhan sektoral yang konstan ini mengarah pada ukuran dispersi pertumbuhan sektoral sekitar laju pertumbuhan keseluruhan selama waktu tertentu. Ukuran dispersi ini merupakan koefisien variasi tipe Person sebagai berikut :

$$S = 1 / g \sqrt{1/n \epsilon (g_i - G)^2}$$

Keterangan :
 S = indeks pertumbuhan seimbang
 G = laju pertumbuhan PDB
 N = jumlah sektor (primer, manufaktur dan jasa)
 g_i = laju pertumbuhan nilai tambah bruto sektor ke – i

Indeks ketidak seimbangan (imbalance index) Yotopoulus dan Lau (1970) dapat didefinisikan, yaitu yang berkenan adanya penyimpangan (dispersion) dari keseimbangan, dan keadaan tersebut harus mengangsur dua unsur, yaitu : (1) penyimpangan tingkat pertumbuhan sektoral yang mengelilingi tingkat pertumbuhan seluruhnya dalam periode tertentu (pengertian Samuelson-Solow), (2) bobot sektoral yang dapat mencerminkan elastisitas pendapatan dari komposisi sektoral (pengertian Nurkse-Chenery). Unsur ketiga yang juga harus dimasukkan agar sesuai dengan kriteria sifat konseptual, yaitu : (3) kontribusi yang relatif dari setiap sektor dalam perekonomian.

Berdasarkan formulasi tersebut, Yotopoulus dan Nugent membuat definisi index imbalanced. Yotopoulus dan Nugent (1976) memberikan rumusan tentang pengertian pertumbuhan yang seimbang dengan mengkombinasikan elemen-elemen pada teori pertumbuhan dengan prinsip-prinsip pembangunan ekonomi. Dengan perkataan lain, setiap sektor tumbuhan melalui jalur perluasan (*expansionpath*) yang di tentukan oleh elastisitas pendapatan konsumen. Inilah arti kuantitatif *balanced growth*. Yang sesungguhnya, Yotopaulus dan Nugent memasukkan bobot sektoral (W_i) dalam formulasi indeksnya sebagai berikut :

$$V = 1 / G \sqrt{\epsilon W_i (g_i - b_i G)^2}$$

Keterangan :
 V = indek pertumbuhan takseimbang (*index imbalanced*).
 G = tingkat rata-rata pertumbuhan ekonomi dalam periode tertentu
 g_i = tingkat pertumbuhan sektor,

b_i = simbol yang di pakai Nurkes tentang balanced yang setara dengan pengertian *Chenery tentang income elasticity of sectoral composition*, (lihat nilai b_i pada persamaan -7)
 w_i = sumbangan sektoral ke – i ; keterangan ϵw_i

Dari notasi di atas terlihat jarak pertumbuhan yang di ukur adalah perbedaan tingkat pertumbuhan sektor (g_i) dengan tingkat rata-rata pertumbuhan ekonomi setelah dimasukkan bobot sektoral yang mencerminkan elastisitas pendapatan sektoral ($b_i \cdot G$) dengan memasukkan bobot sektoral (kontribusi relatif) setiap sektor tingkat penyimpangan yang tinggi pada tingkat pertumbuhan sektoral dari tingkat pertumbuhan ekonomi keseluruhan dapat diartikan sebagai *index imbalanced* yang tinggi. Sebaliknya suatu hubungan yang positif di antara *index imbalanced* dan tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan *index imbalanced* yang rendah.

Untuk mengukur hubungan antara *index imbalanced* dengan tingkat pertumbuhan ekonomi digunakan pengujian korelasi rank Spearman (r_s) yang dapat di rumuskan sebagai berikut :

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum d_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

Keterangan : r_s = koefisien korelasi Spearman
 d_i = perbedaan nilai antara variabel V dan G
 n = ukuran sampel

Pengujian *index balanced* dan *imbalanced* tersebut akan menghasilkan suatu gambaran hubungan antara indeks – indeks tersebut dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan per kapita. Hal ini selanjutnya memberikan petunjuk tentang strategi pembangunan dan kebijakan pertumbuhan yang dilaksanakan oleh suatu negara / regional untuk periode waktu tertentu.

E. PERTUMBUHAN SEKTORAL PEREKONOMIAN PROVINSI RIAU

Hadirin yang saya hormati,

Secara makro, potensi ekonomi daerah biasanya juga menjadi salah satu indikator daya saing daerah tersebut (Isyandi, 2005). Hal itu karena potensi ekonomi suatu daerah akan ikut membentuk kompleksitas daya saing daerah. Keunggulan daya saing suatu daerah akan tercipta jika daerah tersebut memiliki kompetensi inti (*core competence*) yang dapat dibedakan dari wilayah lainnya. Kompetensi inti dapat diwujudkan melalui *create factor*, yaitu upaya menciptakan berbagai faktor produksi yang bisa mendatangkan prestasi yang lebih baik.

Potensi ekonomi daerah tersebut merupakan modal dasar bagi pertumbuhan ekonomi, industri, investasi, penyerapan tenaga kerja, dan pangsa pasar bagi produk-produk industri, pertanian dan jasa. Potensi ekonomi suatu daerah juga akan menggambarkan kemampuan daerah tersebut dalam memacu pertumbuhan ekonomi, kemampuannya dalam penyerapan investasi, tenaga kerja, barang, jasa, dan tabungan.

Indikator potensi ekonomi suatu daerah dapat diukur berdasarkan kinerja sektor perekonomian, biasanya dibagi ke dalam (9) sembilan sektor yang terdapat dalam PDRB daerah tersebut. Sembilan sektor tersebut adalah, sektor pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan sektor jasa-jasa.

PDRB merupakan nilai barang dan jasa akhir berdasarkan harga pasar, yang diproduksi oleh sebuah perekonomian dalam satu periode (kurun waktu) dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang berada (berlokasi) dalam perekonomian tersebut.

Besarnya PDRB dapat menunjukkan beberapa hal penting dalam sebuah perekonomian yaitu (Samuelson, Nordhaus, 1995) :

- a. Merupakan gambaran awal tentang seberapa efisien sumber daya yang ada dalam perekonomian digunakan untuk memproduksi barang dan jasa

- b. Merupakan gambaran awal tentang produktivitas dan tingkat kemakmuran suatu daerah atau negara
- c. Merupakan gambaran awal tentang masalah struktural (mendasar) yang dihadapi suatu perekonomian. Jika sebahagian besar PDRB berasal dari sektor pertanian, maka perekonomian itu berhadapan dengan ketimpangan struktur produksi, untuk itu perekonomian harus segera memodernisasikan dirinya dengan memperkuat sektor industrinya.

E.1. Gambaran Nilai PDRB Kabupaten di Provinsi Riau

Setiap Kabupaten dan Kota mempunyai potensi dan keunggulan sumber daya yang berbeda, sehingga menghasilkan gambaran kemampuan yang berbeda pula, khususnya yang berkaitan dengan kondisi perekonomian daerah, yang tercermin salah satunya melalui Nilai PDRB masing-masing kota dan Kabupaten tersebut

PDRB terbesar dimiliki oleh kabupaten Bengkalis, hal ini disebabkan Bengkalis sejak lama mempunyai sumber daya alam minyak dan gas terbesar, kemudian disusul oleh kabupaten Siak yang merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Bengkalis (pada tahun 1999) yang kaya akan sumber mineral minyak dan gas serta peninggalan sejarah Istana Siak. Selain kekayaan migas kabupaten Siak juga mempunyai potensi pertanian khususnya sub sektor perkebunan dengan komoditi unggulan kelapa sawit, dan ditunjang industri pengolahan kertas dan lain-lain yang menunjang hasil produksi daerah (PDRB) tersebut, yang sebagian juga komoditi yang memberikan kontribusi ekspor yang cukup besar. Kemudian diikuti oleh kabupaten Rokan Hilir dengan letak geografisnya yang berdekatan dengan negara tetangga Malaysia, membuat daerah ini sebagai daerah transit dan perdagangan antar pulau dan antar negara yang menyebabkan sektor keuangan juga berkembang, demikian pula sektor jasa.

Berikut gambaran tentang nilai PDRB kabupaten dan Kota di Provinsi Riau :

Tabel 9 : Perkembangan PDRB Kabupaten dan Kota Di Propinsi Riau Tahun 2005- 2008 (Juta Rupiah)

No	Kab/Kota	Tahun			
		2005	2006	2007	2008
1	Kuansing	2.119.091,21	2.306.236,82	2.511.608,96	2.718.998,77
2	Indragiri Hulu	3.030.169,59	3.245.331,27	3.469.108,22	3.722.816,19
3	Indragiri Hilir	4.654.045,18	5.023.420,87	5.416.154,25	5.846.659,07
4	Pelalawan	2.325.917,36	2.500.942,71	2.670.775,22	2.856.946,95
5	Siak	14.028.230,35	14.567.279,29	14.748.096,91	15.416.737,55
6	Kampar	7.251.647,68	7.563.362,66	7.827.594,75	8.279.263,32
7	Rohul	1.995.598,46	2.132.572,02	2.271.851,09	2.426.330,44
8	Bengkalis	24.222.298,89	25.161.093,53	25.313.723,74	26.394.553,38
9	Rohil	10.201.672,10	10.581.305,84	10.796.848,05	11.336.110,22
10	Pekanbaru	5.780.933,15	6.367.596,81	6.997.154,88	7.630.422,50
11	Dumai	2.958.220,29	3.091.001,17	3.303.147,41	3.474.178,79
12	Total Kab/ Kota	78.567.824,27	82.540.142,99	85.326.063,49	90.103.017,19
13	Provinsi	79.287.586,75	83.370.867,24	86.213.259,46	91.085.381,81

Sumber : BPS Kabupaten / Kota se Provinsi Riau, beberapa edisi

PDRB terkecil dimiliki oleh kabupaten Kuansing, yang merupakan salah satu kota hasil pemekaran dari kabupaten Kampar (pada tahun 1999) yang juga terkenal dengan kandungan batubara dan mineral serta *pariwisata Pacu Jalur*, dan kabupaten Kuantan Singingi juga merupakan daerah transit, sehingga basis daerah ini masih dominan bertumpu pada sektor angkutan dan komunikasi serta SDM yang masih relatif rendah, kemudian disusul oleh kabupaten Rokan Hulu yang bertumpu pada sektor pertanian terutama sektor perkebunan dengan komoditi unggulan kelapa sawit dan karet, namun komoditi tersebut lebih banyak dimiliki oleh perusahaan besar swasta dan BUMN yang hanya menyumbang sebagian kecil saja terhadap PDRB kabupaten tersebut. Sementara Kabupaten Pelalawan masih mempunyai PDRB yang kecil, karena kabupaten ini masih bertumpu pada sektor pertanian yang tradisional dan turun temurun, dan masyarakat masih dengan struktur yang terpolarisasi walaupun di kabupaten ini telah berdiri industri pulp dan kertas PT.RAPP dan PT. RAK.

E.2 Gambaran Kontribusi Sektor Ekonomi Terhadap PDRB Kabupaten

Kontribusi masing-masing sektor ekonomi sebagaimana tersebut di atas menggambarkan struktur ekonomi daerah tersebut, karena dengan mengetahui kontribusi sektor tersebut, maka bisa dilihat tingkat industrialisasi suatu daerah atau negara. Bank Dunia menetapkan kriteria sebagai berikut :

- a. Non industrialisasi, jika sumbangan sektor industri manufaktur terhadap PDB kurang dari 10 persen
- b. Menuju proses industrialisasi, jika sumbangan sektor industri berkisar antara 10 hingga 20 persen terhadap PDB suatu daerah.
- c. Semi industrialisasi, jika sumbangan sektor industri manufaktur antara 20 hingga 30 persen
- d. Industrialisasi penuh, jika sumbangan sektor industri manufaktur terhadap PDB suatu daerah di atas 30 persen.

Untuk mengetahui potensi ekonomi suatu daerah berdasarkan sektor maka dihitung bagaimana dan seberapa besar sumbangan masing-masing sektor tersebut terhadap PDRB dan kemampuan masing-masing sektor tersebut dalam menyerap tenaga kerja. Sektor yang mampu memberikan sumbangan terbesar dan sekaligus juga sebagai sektor yang dapat melakukan penyerapan tenaga kerja tertinggi, akan menjadi potensi ekonomi unggulan (ekonomi basis) daerah tersebut.

Selanjutnya dicoba pula untuk menggambarkan kondisi masing-masing sektor terhadap PDRB daerah yang menggambarkan struktur ekonomi masing-masing Kabupaten Kota di Provinsi Riau.

Berdasarkan kontribusi sektor terlihat bahwa masing-masing daerah mempunyai struktur ekonomi yang berbeda-beda. Kota Pekanbaru merupakan ibu kota provinsi Riau, kota perdagangan, pusat pemerintahan, pusat aktivitas ekonomi. Hal ini terlihat dari kontribusi terbesar dari sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor jasa, dan sektor bangunan (terutama pertokoan-pertokoan). Faktor ini didorong oleh pesatnya perkembangan sektor-sektor tersebut. Pesatnya investasi di

bidang tersebut menyebabkan kota Pekanbaru memperoleh anugerah penghargaan 'investasi award' dari BPI, karena dengan iklim investasi yang kondusif yang diciptakan sehingga memotivasi datangnya investor untuk menanamkan investasinya di kota Pekanbaru.

Kota Dumai merupakan kabupaten yang baru terbentuk hasil pemekaran dari kabupaten Bengkalis (pada tahun 1999) dengan jumlah penduduk terkecil di provinsi Riau. Kota ini merupakan kota yang terkenal dengan pelabuhan lautnya dan sebagai transit antar pulau dan negara tetangga, sehingga tidak mengherankan jika kontribusi terbesar berada di sektor perdagangan, dan sektor pengangkutan dan komunikasi.

Kabupaten Bengkalis merupakan kabupaten berbasis pertanian (khususnya sub sektor perikanan), di samping sektor perdagangan, hotel dan restoran. Hal ini disebabkan wilayahnya yang berada di posisi strategis dengan negara tetangga Malaysia, sehingga arus lalu lintas perdagangan cukup berkembang dengan pesat. Demikian pula dengan wilayah perairannya yang menyebabkan kabupaten ini berpotensi dalam hasil perikananannya.

Selanjutnya, Kabupaten Siak adalah kabupaten yang berbasis industri pengolahan, dan pertanian. Oleh karena itu sumbangan kedua sektor tersebut terbesar terhadap PDRB, namun industri yang berkembang adalah industri besar yang terfokus pada perkayuan, dan kertas. Sementara pada sektor pertanian adalah sub sektor perkebunan seperti kelapa sawit.

Di sisi lain, Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, Kampar, dan Pelalawan, mempunyai basis di sektor pertanian. Namun pertanian yang menjadi basis adalah berbeda-beda dalam setiap kabupaten tersebut, seperti : Rokan Hilir dan Rokan Hulu bergerak di sub sektor perkebunan, yaitu kelapa sawit dan karet sebagai produk unggulan.

Sementara Indragiri Hilir lebih dominan di sub sektor perkebunan dengan produk unggulan adalah kelapa yaitu melalui pengolahan kelapa

tersebut menjadi komoditi lainnya seperti minyak kelapa, nata decoco, tepung kelapa (untuk perusahaan besar), kopra dan gula kelapa, meubel yang bahan bakunya dari pohon kelapa (usaha yang dikelola masyarakat), walaupun akhir-akhir ini juga dikembangkan komoditi kelapa sawit.

Kabupaten Indragiri Hulu, mempunyai basis di sub sektor perkebunan dengan tanaman unggulan karet dan kelapa sawit, serta di sektor industri pengolahan CPO. Sementara Kabupaten Kampar di sub sektor perikanan dan sub sektor perkebunan kelapa sawit.

Kabupaten Pelalawan di samping sektor pertanian (sub sektor perkebunan) dengan komoditi kelapa sawit sebagai unggulan dan basis, juga industri pengolahan dari hasil kehutanan.

Dari kontribusi persektor di atas, maka dapat terpilih 3 (tiga) sektor terbesar untuk masing-masing daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau. Tabel dibawah ini menggambarkan bahwa Provinsi Riau sebagai wilayah yang didominasi wilayah daratan, ternyata yang dominan adalah sektor pertanian, keadaan ini bahwa sebahagian besar daerah didominasi sub sektor perkebunan, sub sektor perikanan, sub sektor kehutanan, dan sub sektor tanaman pangan, namun sektor industri pengolahan baik yang mengolah hasil pertanian (agroindustri) maupun industri non pertanian berpotensi untuk berkembang. Daerah yang spesifik adalah Pekanbaru dan Dumai, yang tidak berbasiskan sektor pertanian, tetapi mempunyai kontribusi terbesar di sektor perdagangan, bangunan dan jasa, serta sektor pengangkutan dan komunikasi. Hal ini sesuai dengan kondisi Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan pemerintah serta pembangunan yang terlihat pesat terutama perdagangan (seperti mall, dan Ruko-ruko), dan jasa-jasa profesional, pendidikan, dan jasa-jasa lainnya. Sementara Kota Dumai sebagai kota persinggahan juga dominan dengan sektor perdagangan, dan tentunya didukung dengan tersedianya sektor pengangkutan sebagai sarana transportasi, baik darat maupun laut.

Dilihat unggul karena memiliki pelabuhan samudra karena letak geografis yang sangat strategis.

Gambaran tentang sektor seperti pada Tabel 10 memberikan inspirasi bahwa pertumbuhan ekonomi provinsi Riau yang cukup pesat membawa pengaruh pada perubahan struktur ekonomi di 11 kabupaten dan kota, dimana sebahagian besar kabupaten dan kota di Provinsi Riau terjadi pergeseran dari sektor pertanian sebagai basis menjadi sektor industri dan jasa serta sektor lainnya. Terlihat juga bahwa hampir semua kabupaten dan kota di provinsi Riau (kecuali Rokan Hulu dan Indragiri Hilir) tidak hanya bertumpu pada satu sektor saja sebagai basis, melainkan ada beberapa sektor yang dapat dijadikan basis di samping adanya potensi sektor non basis yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB kabupaten dan kota tersebut yang dapat dijadikan basis untuk pengembangan komoditi unggulan di masa yang akan datang di daerah tersebut.

Tabel 10 : Kontribusi Sektor Terhadap PDRB Dan LQ Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Riau Tahun 2005-2009

No.	Kabupaten	Kontribusi Sektor Terhadap PDRB dan LQ								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pekanbaru	1,93 NON BASIS	0,03 NON BASIS	11,61 NON BASIS	1,46 BASIS	17,30 BASIS	29,58 BASIS	14,67 BASIS	5,18 BASIS	18,22 BASIS
2.	Dumai	7,20 NON BASIS	0,43 NON BASIS	Potensi 26,64 NON BASIS	0,66 BASIS	13,63 BASIS	20,89 BASIS	16,47 BASIS	1,66 BASIS	12,46 BASIS
3.	Bengkalis	Potensi 20,20 NON BASIS	Potensi 36,79 NON BASIS	10,96 NON BASIS	0,43 BASIS	2,65 NON BASIS	18,39 BASIS	2,14 NON BASIS	1,27 BASIS	7,16 BASIS
4.	Siak	Potensi 22,03 NON BASIS	Potensi 35,81 NON BASIS	33,68 BASIS	0,06 NON BASIS	0,54 NON BASIS	3,32 NON BASIS	1,09 NON BASIS	0,57 NON BASIS	2,83 NON BASIS
5.	Rokan Hilir	Potensi 39,24 BASIS	31,53 NON BASIS	6,59 NON BASIS	0,20 NON BASIS	0,55 NON BASIS	14,70 BASIS	1,85 NON BASIS	0,99 NON BASIS	4,35 NON BASIS
6.	Rokan Hulu	60,90 BASIS	4,03 NON BASIS	5,56 NON BASIS	0,07 NON BASIS	3,73 NON BASIS	5,23 NON BASIS	2,66 NON BASIS	1,55 NON BASIS	8,60 NON BASIS
7.	Indragiri Hulu	50,52 BASIS	3,44 NON BASIS	19,01 BASIS	0,24 NON BASIS	5,30 NON BASIS	8,23 NON BASIS	3,85 NON BASIS	1,22 NON BASIS	8,19 NON BASIS
8.	Indragiri Hilir	49,56 BASIS	0,62 NON BASIS	POTENSI 16,49 NON BASIS	0,10 NON BASIS	4,10 NON BASIS	14,88 NON BASIS	2,96 NON BASIS	1,62 NON BASIS	9,68 NON BASIS
9.	Kuantan Singingi	59,98 BASIS	4,90 BASIS	8,01 NON BASIS	0,20 NON BASIS	5,88 NON BASIS	7,86 NON BASIS	2,28 NON BASIS	1,19 NON BASIS	9,69 NON BASIS
10.	Kampar	46,68 BASIS	26,57 BASIS	6,07 NON BASIS	0,09 NON BASIS	3,45 NON BASIS	7,76 NON BASIS	2,45 NON BASIS	0,82 NON BASIS	6,13 NON BASIS
11.	Pelalawan	56,53 BASIS	2,46 NON BASIS	27,16 BASIS	0,13 NON BASIS	2,85 NON BASIS	3,20 NON BASIS	2,22 NON BASIS	1,45 NON BASIS	4,01 NON BASIS

Keterangan : 1) Pertanian, 2) Pertambangan dan Penggalian, 3) Industri Pengolahan, 4) Listrik, Gas, Dan Air Minum, 5) Bangunan, 6) Perdagangan, Hotel dan Restoran, 7) Pengangkutan dan Komunikasi, 8) Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan, 9) Jasa-jasa
Kontribusi dinyatakan dalam angka persen sedangkan nilai LQ dinyatakan dalam basis dan non basis.

E.3. Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Riau

Tingkat Perkembangan sektor ekonomi di masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Riau dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai masing-masing daerah tersebut. Menurut Sadono Sukirno (2006), pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Menurut teori kutub pertumbuhan (Lincoln Arsyad, 1999), menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak muncul di berbagai daerah pada waktu yang sama. Pertumbuhan hanya terjadi di beberapa tempat yang merupakan pusat (kutub) pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda.

Untuk melihat perkembangan ekonomi tersebut dapat dilihat pada tabel 10 :

Tabel 11 : Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten/ Kota ADH Konstan Tahun 2000 Tanpa Migas Provinsi Riau (2005-2008).

No	Kab/Kota	Tahun			
		2005	2006	2007	2008
1	Kuansing	8,81	8,83	8,91	8,26
2	Inhil	7,54	7,41	7,36	7,53
3	Inhil	7,03	7,94	7,82	7,95
4	Pelalawan	7,11	7,66	7,20	7,14
5	Siak	6,88	7,82	7,85	7,61
6	Kampar	7,33	7,71	7,99	7,97
7	Rohul	7,38	7,23	7,11	7,08
8	Bengkalis	7,40	7,69	7,87	7,60
9	Rohil	7,92	8,07	7,95	7,88
10	Pekanbaru	10,05	10,15	9,89	9,05
11	Dumai	7,74	9,34	8,87	8,66
12	Total Kab/ Kota	7,90	8,29	8,22	8,00
13	Provinsi	8,54	8,66	8,25	8,06

Sumber : BPS, BAPPEDA diolah 2009

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada umumnya kabupaten dan kota mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang baik, yaitu masih di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,1 persen. Pertumbuhan ekonomi yang rata-rata berkembang ini menunjukkan iklim yang baik untuk investasi, industri pengolahan dan aktivitas bisnis lainnya.

F. PERKEMBANGAN REGIONAL PROVINSI RIAU : ANALISIS SEKTOR BASIS KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI RIAU

Hadirin yang saya hormati,

Sektor basis merupakan sektor yang memiliki peranan dalam suatu perekonomian daerah sehingga kemajuan dan kemunduran sektor ini akan mampu membawa pengaruh terhadap perekonomian daerah tersebut. Teori basis ekonomi yang melandasi pemahaman terhadap sektor basis dalam pembangunan daerah dipergunakan untuk mengetahui peranan suatu sektor dalam perekonomian daerah termasuk efek yang ditimbulkannya (Richardson, 2001).

Aktifitas-aktifitas pada sektor basis akan menghasilkan pendapatan basis, sedangkan aktifitas-aktifitas non basis akan menghasilkan pendapatan non basis. Penjumlahan pendapatan basis dan non basis merupakan pendapatan total dari daerah yang bersangkutan (Sukirno, 1986). Implikasi dari aktifitas sektor basis adalah dengan bertambahnya aktifitas sektor basis dalam suatu daerah maka akan menambah arus pendapatan ke dalam daerah tersebut, sehingga peningkatan pendapatan sebagai akibat peningkatan sektor basis tersebut akan mengakibatkan peningkatan permintaan barang dan jasa pada daerah itu.

Richardson (2001), mengemukakan bahwa metode Quosien Lokasi paling lazim digunakan dalam mengidentifikasi aktifitas basis dan non basis. Hal ini disebabkan karena metode ini mempunyai beberapa kebaikan, antara lain adalah: 1) modelnya sederhana, 2) memperlihatkan penjualan barang-barang antara, 3) dapat diterapkan untuk data historis guna melihat kecenderungan, (4) mudah diterapkan, dan (5) relatif murah dalam mengoperasikannya. Analisis Location quotient (LQ) digunakan untuk menentukan sektor unggulan atau basis ekonomi suatu perekonomian wilayah. Sektor unggulan yang berkembang dengan baik tentunya mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan daerah secara optimal

Kriteria pengukuran nilai LQ yang dihasilkan mengacu pada kriteria yang dikemukakan Bendavid-Val (Robinson Tarigan, 2004) sebagai berikut :

- 1) $LQ > 1$, berarti tingkat spesialisasi sektor tertentu pada tingkat daerah lebih besar dari sektor yang sama pada tingkat provinsi.
- 2) $LQ < 1$, berarti tingkat spesialisasi sektor tertentu pada tingkat daerah lebih kecil dari sektor yang sama pada tingkat provinsi.
- 3) $LQ = 1$, berarti tingkat spesialisasi sektor tertentu pada tingkat daerah sama dengan sektor yang sama pada tingkat provinsi

Dalam kaitan dengan hal di atas, bila nilai $LQ > 1$ maka sub sektor atau sektor tersebut merupakan sektor/ sub sektor unggulan di daerah dan potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian daerah. Apabila $LQ < 1$ maka sektor/ sub sektor tersebut bukan merupakan sektor/sub sektor unggulan dan kurang potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka perbandingan sektor basis antar daerah kajian dilakukan dengan menggunakan data PDRB persektor berdasarkan harga konstan tahun 2000, dan analisis dilakukan terhadap data *series* 9 (sembilan) tahun, yakni dari tahun 2000-2008.

Melalui kajian ini dapat diketahui bahwa berdasarkan perbandingan LQ antar sektor di masing-masing daerah di Provinsi Riau terdapat perbedaan potensi berdasarkan struktur ekonomi yang ada pada masing-masing daerah tersebut.

Hadirin yang saya hormati,

1. Kota Pekanbaru

Rata-rata persentase kontribusi masing-masing sektor dalam struktur perekonomian daerah dari data *time series* PDRB menjadi dasar perhitungan bagi melihat *trend* sektor basis di Kota Pekanbaru dengan

metode LQ. Dari data PDRB per sektor tahun 2000 – 2008 diperoleh rata-rata persentase kontribusi sektor yang terbesar yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran; dan sektor penyumbang rata-rata terkecil adalah sektor pertambangan dan penggalian sebagaimana yang terlihat pada Gambar 3.



Gambar 3 : Rata-rata Persentase Kontribusi Persektor pada PDRB Kota Pekanbaru, Tahun 2000 – 2008 berdasarkan ADH 2000.

Selanjutnya berdasarkan analisis terhadap sektor dalam struktur perekonomian yang ada dalam PDRB Kota Pekanbaru, maka sektor yang menonjol peranannya secara berurut berdasarkan hasil analisis LQ adalah Sektor Listrik, Gas, dan Air Minum, Sektor Bangunan, Sektor Pengangkutan dan Komunikasi, Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, Sektor Jasa-Jasa, dan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran. Kontribusi sektor tersebut dalam struktur perekonomian berdasarkan angka rata-rata pertahun terlihat pada Tabel 9.

Walaupun angka LQ untuk Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih paling besar, namun kontribusi terbesar dalam struktur perekonomian Kota Pekanbaru selama periode 2000-2008 diberikan oleh Sektor 6 (Perdagangan, Hotel dan Restoran), dimana kontribusi rata-rata sektor ini adalah 28,46 persen pertahun selama kurun waktu tersebut.

Tabel 9 : Analisis Potensi (Sektor Basis) Kota Pekanbaru Berdasarkan Kontribusi PDRB Per Sektor, Tahun 2000-2008 berdasarkan ADH Konstan 2000

Sumber : BPS dan Bappeda Kota Pekanbaru, PDRB Kota Pekanbaru, beberapa edisi, diolah.

Keterangan :

- Sektor 1 = Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan
- Sektor 2 = Pertambangan dan Penggalian
- Sektor 3 = Industri Pengolahan
- Sektor 4 = Listrik, Gas dan Air Bersih
- Sektor 5 = Bangunan
- Sektor 6 = Perdagangan, Hotel dan Restoran
- Sektor 7 = Angkutan dan Komunikasi
- Sektor 8 = Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan
- Sektor 9 = Jasa-jasa

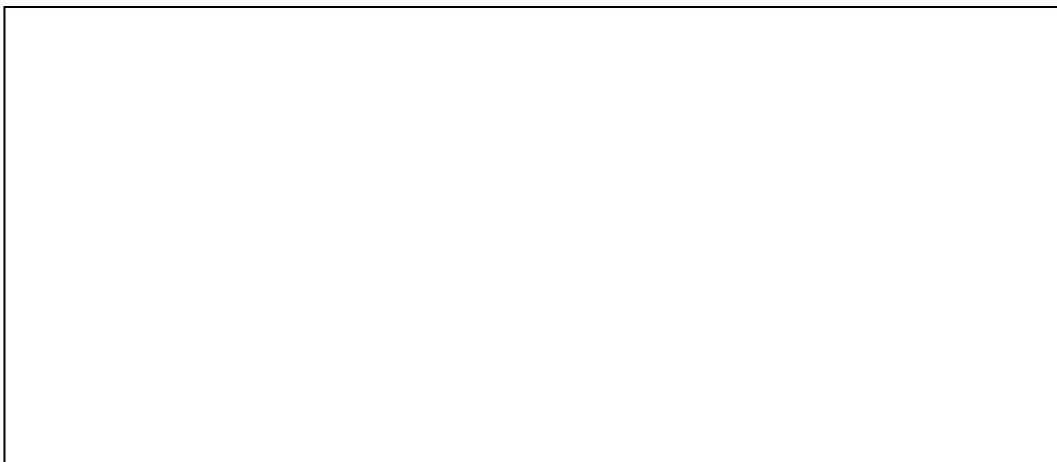
Dalam struktur perekonomian Kota Pekanbaru, peranan sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran memang paling besar, **di samping itu juga sektor bangunan dan sektor angkutan dan komunikasi**, sektor keuangan persewaan dan jasa Perusahaan, dan sektor jasa-jasa. Walaupun nilai LQ terbesar adalah pada sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, hal ini dapat dipahami karena kegiatan sektor basis lainnya di Kota Pekanbaru dan posisi Kota Pekanbaru sebagai ibu Kota Provinsi Riau merupakan daerah pemusatan bagi kegiatan sektor 4 tersebut dan kegiatan sektor lainnya, seperti yang dijelaskan di atas.

2. Kabupaten Siak

Untuk kabupaten Siak, hasil penghitungan nilai LQ dari data *series* PDRB per lapangan usaha berdasarkan harga konstan tahun 2000 untuk

periode waktu tahun 2000 – 2008; yang menjadi sektor basis di daerah ini adalah sektor pertambangan dan penggalan dan industri pengolahan.

Rata-rata persentase kontribusi masing-masing sektor dalam struktur perekonomian Kabupaten Siak per sektor tahun 2000 – 2008 persentase kontribusi sektor yang terbesar yaitu sektor industri pengolahan, dan sektor penyumbang rata-rata terkecil adalah sektor listrik, gas dan air bersih, sebagaimana yang terlihat pada Gambar 4.



Gambar 4: Rata-rata Persentase Kontribusi Persektor pada PDRB Kabupaten Siak, Tahun 2000 – 2008 berdasarkan ADH Konstan 2000.

Berdasarkan analisis terhadap sektor dalam struktur perekonomian yang ada dalam PDRB kabupaten Siak, maka sektor yang menonjol perannya secara dominan berdasarkan hasil analisis LQ adalah Sektor Industri Pengolahan. Kontribusi sektor tersebut dalam struktur perekonomian berdasarkan angka rata-rata pertahun terlihat pada Tabel 10.

Tabel 10 : Analisis Potensi (Sektor Basis) Kabupaten Siak Berdasarkan Kontribusi PDRB Per Sektor, Tahun 2000 - 2008 berdasarkan ADH Konstan 2000

Sumber : BPS dan Bappeda Kabupaten Siak, PDRB Kabupaten Siak, beberapa edisi, diolah.

Keterangan :

- Sektor 1 = Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan
- Sektor 2 = Pertambangan dan Penggalian
- Sektor 3 = Industri Pengolahan
- Sektor 4 = Listrik, Gas dan Air Bersih
- Sektor 5 = Bangunan
- Sektor 6 = Perdagangan, Hotel dan Restoran
- Sektor 7 = Angkutan dan Komunikasi
- Sektor 8 = Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan
- Sektor 9 = Jasa-jasa

Angka LQ untuk Industri Pengolahan yang merupakan sektor basis dan menjadi sektor yang potensial di daerah ini juga mempunyai kontribusi terbesar di samping sektor pertambangan dan penggalian yang merupakan kekayaan alam dalam struktur perekonomian Kabupaten Siak selama periode 2000-2008, dimana kontribusi rata-rata sektor ini pertahun selama kurun waktu tersebut masing-masing 33,68 persen dan 35,81 persen.

Ditinjau dari aktifitas ekonomi di Kabupaten Siak, memang keberadaan industri pengolahan di daerah ini menjadi penggerak aktifitas ekonomi lainnya. Adapun komoditi ekspor terbesar Kabupaten Siak yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun adalah kelompok komoditi kertas dan barang dari kertas, selanjutnya kelompok komoditi bahan kertas dan kelompok komoditi kayu lapis.

Jelas dari komoditi yang menjadi andalan di daerah ini, maka bila industri besar yang ada di daerah ini mampu menarik aktifitas ekonomi lainnya dan masyarakat mampu berkontribusi dalam aktifitas kegiatan

industri pengolahan yang dilakukan, barulah sektor unggulan ini berperan dan memberikan prospek yang baik bagi perkembangan aktifitas ekonomi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.

3.Kota Dumai

Rata-rata persentase kontribusi masing-masing sektor dalam struktur perekonomian Kota Dumai dari data *time series* PDRB per sektor tahun 2000-2008 menunjukkan bahwa kontribusi sektor yang terbesar yaitu sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan hotel dan restoran, sementara sektor penyumbang rata-rata terkecil adalah sektor listrik, gas dan air bersih, sebagaimana yang terlihat pada Gambar 5.



Gambar 5 : Rata-rata Persentase Kontribusi Persektor pada PDRB Kota Dumai, Tahun 2000 – 2008 berdasarkan ADH Konstan 2000.

Selanjutnya berdasarkan analisis terhadap sektor dalam struktur perekonomian yang ada dalam PDRB Kota Dumai, maka sektor yang menonjol peranannya secara berurut berdasarkan hasil analisis LQ adalah Sektor Angkutan dan Komunikasi, Sektor Bangunan, Sektor Listrik Gas dan Air Bersih, Sektor Perdagangan Hotel dan Restoran, Sektor Jasa-Jasa, dan Sektor Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan.

Kontribusi sektor tersebut dalam struktur perekonomian berdasarkan angka rata-rata pertahun terlihat pada Tabel 11.

Tabel 11 : Analisis Potensi (Sektor Basis) Kota Dumai Berdasarkan Kontribusi PDRB Per Sektor, Tahun 2000-2008 berdasarkan ADH Konstan 2000

Sumber : BPS dan Bappeda Kota Dumai, PDRB Kota Dumai, beberapa edisi, diolah.

Keterangan :

- Sektor 1 = Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan
- Sektor 2 = Pertambangan dan Penggalian
- Sektor 3 = Industri Pengolahan
- Sektor 4 = Listrik, Gas dan Air Bersih
- Sektor 5 = Bangunan
- Sektor 6 = Perdagangan, Hotel dan Restoran
- Sektor 7 = Angkutan dan Komunikasi
- Sektor 8 = Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan
- Sektor 9 = Jasa-jasa

Dalam struktur perekonomian Kota Dumai, peranan sektor industri pengolahan dan sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran memang paling besar dan ternyata sektor ini juga menjadi sektor basis di daerah ini.

Berkaitan dengan hal di atas prospek pengembangan produk/barang dan jasa di Kota Dumai, menunjukkan bahwa aktifitas yang sesuai untuk dikembangkan adalah yang secara langsung berhubungan dengan sektor basis daerah. Namun seperti halnya kota Pekanbaru, kota Dumai menjadi juga salah satu pusat industri dan perdagangan serta jasa yang berkembang sekitarnya.

4. Kabupaten Bengkalis

Pada sisi lain, rata-rata persentase kontribusi masing-masing sektor dalam struktur perekonomian Kabupaten Bengkalis dari data *time series* PDRB tahun 2000-2008 adalah sebagaimana terlihat pada gambar 6.



Gambar 6 : Rata-rata Persentase Kontribusi Persektor pada PDRB Kabupaten Bengkalis, Tahun 2000 – 2004 berdasarkan ADH Konstan 2000.

Dari Gambar diatas terlihat bahwa, maka sektor pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi paling besar di daerah ini selain pertanian dan sektor perdagangan. Selanjutnya berdasarkan analisis terhadap sektor dalam struktur perekonomian yang ada dalam PDRB Kabupaten Bengkalis tersebut, maka sektor yang menonjol peranannya secara berurut berdasarkan hasil analisis LQ adalah Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih, Sektor Jasa-Jasa, dan Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan. Kontribusi sektor tersebut dalam struktur perekonomian dan hasil analisis potensi daerah berdasarkan LQ pada Tabel 12.

Tabel 12 : Analisis Potensi (Sektor Basis) Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Kontribusi PDRB Per Sektor, Tahun 2000-2008 berdasarkan ADH Konstan 2000

Sumber : BPS dan Bappeda Kabupaten Bengkalis, PDRB Kabupaten Bengkalis, beberapa edisi, diolah.

Keterangan :

- Sektor 1 = Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan
- Sektor 2 = Pertambangan dan Penggalian
- Sektor 3 = Industri Pengolahan
- Sektor 4 = Listrik, Gas dan Air Bersih
- Sektor 5 = Bangunan
- Sektor 6 = Perdagangan, Hotel dan Restoran
- Sektor 7 = Angkutan dan Komunikasi
- Sektor 8 = Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan
- Sektor 9 = Jasa-jasa

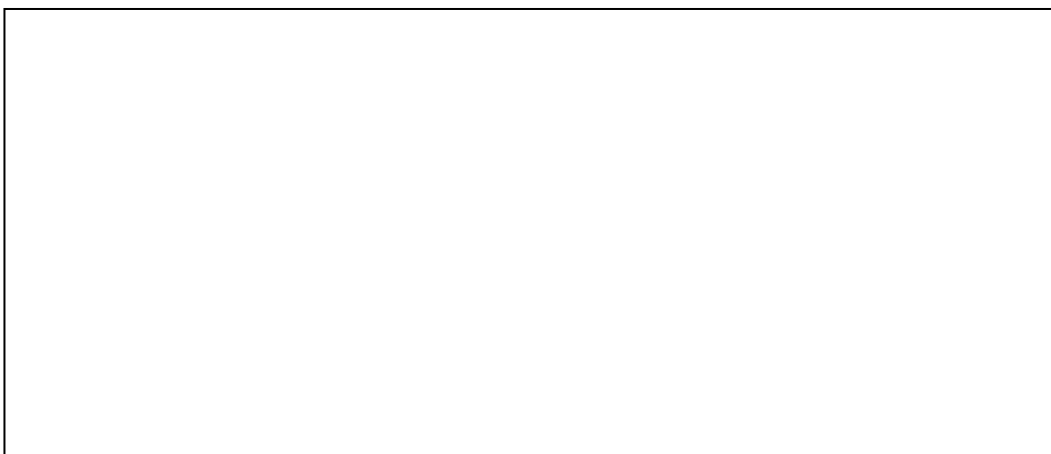
Walaupun angka LQ untuk Perdagangan, Hotel dan Restoran paling besar, namun kontribusi terbesar dalam struktur perekonomian Kabupaten Bengkalis selama periode 2000-2008 diberikan oleh Sektor (Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan), dimana kontribusi rata-rata sektor ini adalah 20,20 persen pertahun selama kurun waktu tersebut, di samping itu didukung oleh sektor perdagangan hotel dan restoran sebagai wilayah yang secara geografis mendukung sektor perdagangan.

5.Kabupaten Pelalawan

Untuk kabupaten Pelalawan, hasil penghitungan nilai LQ dari data time series PDRB perlapangan usaha berdasarkan harga konstan tahun 2000 pada periode tahun 2000 – 2008; yang menjadi sektor basis di

daerah ini adalah industri pengolahan dan sektor Pertanian Peternakan, Kehutanan dan Perikanan.

Rata-rata persentase kontribusi masing-masing sektor dalam struktur perekonomian Kabupaten Pelalawan per sektor tahun 2000 – 2008 menunjukkan bahwa kontribusi sektor yang terbesar yaitu sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan, dan sektor penyumbang rata-rata terkecil adalah sektor listrik gas dan air bersih, sebagaimana yang terlihat pada Gambar 7.



Gambar 7 : Rata-rata Persentase Kontribusi Persektor pada PDRB Kabupaten Pelalawan, Tahun 2000 – 2008 berdasarkan ADH Konstan 2000.

Berdasarkan analisis sektor dalam struktur perekonomian yang ada dalam PDRB Kabupaten Pelalawan, maka sektor yang menonjol peranannya secara dominan berdasarkan hasil analisis LQ adalah Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan. Sedangkan kontribusi terbesar terhadap rata-rata PDRB selama periode 2000-2008 di daerah ini diberikan oleh sektor pertanian, terutama subsektor perkebunan.

Kontribusi sektor tersebut dalam struktur perekonomian berdasarkan angka rata-rata pertahun serta hasil analisis potensi ekonomi daerah terlihat pada Tabel 13.

Tabel 13 : Analisis Potensi (Sektor Basis) Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Kontribusi PDRB Per Sektor, Tahun 2000 - 2008 berdasarkan ADH Konstan 2000

Sumber : BPS dan Bappeda Kabupaten Pelalwan, PDRB Kabupaten Pelalawan, beberapa edisi, diolah.

Keterangan :

Sektor 1 = Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan

Sektor 2 = Pertambangan dan Penggalian

Sektor 3 = Industri Pengolahan

Sektor 4 = Listrik, Gas dan Air Bersih

Sektor 5 = Bangunan

Sektor 6 = Perdagangan, Hotel dan Restoran

Sektor 7 = Angkutan dan Komunikasi

Sektor 8 = Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan

Sektor 9 = Jasa-jasa

Angka LQ untuk Industri Pengolahan yang merupakan sektor basis dan menjadi sektor yang potensial di daerah ini juga mempunyai kontribusi nomor dua terbesar dalam struktur perekonomian Kabupaten Pelalawan selama periode 2000-2008 setelah sektor pertanian yang berkontribusi rata-rata sebesar 56,53. Namun bila kedua sektor ini dibandingkan antara satu dengan lainnya, akan terlihat bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir sektor pertanian mengalami penurunan, sedangkan sektor industri pengolahan terus mengalami peningkatan.

Ditinjau dari aktifitas ekonomi di Kabupaten Pelalawan, memang keberadaan industri pengolahan di daerah ini menjadi penggerak aktifitas ekonomi lainnya. Keberadaan industri kertas di Kabupaten Pelalawan

mampu menggerakkan perekonomian masyarakat secara signifikan. Namun sektor pertanian yang juga merupakan sektor basis selain sektor industri pengolahan juga merupakan salah satu peluang bagi pihak investor untuk berperan dalam pengembangan aktifitas ekonomi masyarakat.

6. Kabupaten Kampar

Selanjutnya, untuk menganalisis potensi daerah berdasarkan struktur perekonomian di Kabupaten Kampar pada jangka waktu 2000-2008 digunakan analisis yang sama dengan daerah lainnya (LQ). Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh, potensi perekonomian Kabupaten Kampar sangat besar pada Sektor 1 (Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan) dan Sektor 2 (Pertambangan dan Pengeksploasian), namun dalam kehidupan dan struktur perekonomian masyarakat di daerah Kabupaten Kampar yang paling berperan adalah sektor pertanian.

Lebih separuh kegiatan perekonomian (rata-rata 46,68 persen) di daerah ini berasal dari Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan selama periode 2000-2008. Sebaliknya Sektor 4 (Sektor Listrik, Gas dan Air minum) dapat dikatakan tidak berkembang dan merupakan sektor yang paling rendah peranannya dalam perekonomian Kabupaten Kampar. (lihat Gambar 8).



Gambar 8 : Rata-rata Persentase Kontribusi Persektor pada PDRB Kabupaten Kampar, Tahun 2000–2008 berdasarkan ADH Konstan 2000.

Kabupaten Kampar juga menjadi daerah utama bagi Sektor 2 (Sektor Penggalian) di Provinsi Riau, hal ini dikarenakan kondisi geografis alam yang lebih memiliki potensi bahan galian dibandingkan daerah lainnya di Provinsi Riau. Kabupaten Kampar memiliki bermacam jenis bahan galian, namun yang telah diusahakan secara ekonomis terutama bahan galian yang berkaitan dengan konstruksi/bangunan, antara lain pasir kuarsa, kerikil, tanah timbunan, dan batuan alam lainnya. Sedangkan batu bara juga merupakan potensi alam yang dimiliki Kabupaten Kampar, tetapi masih belum diusahakan secara ekonomis. Batu bara yang terdapat di Kabupaten Kampar merupakan salah satu cadangan bagi Provinsi Riau sebagai bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Berdasarkan analisis sektor dalam struktur perekonomian yang ada dalam PDRB kabupaten Kampar, maka sektor yang menonjol perannya secara dominan berdasarkan hasil analisis LQ adalah Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan walaupun ada tendensi sektor ini mengalami penurunan ; dan sektor Pertambangan dan penggalian.

Kontribusi sektor tersebut dalam struktur perekonomian berdasarkan angka rata-rata pertahun dan potensinya terlihat pada Tabel 14.

Tabel 14 : Analisis Potensi (Sektor Basis) Kabupaten Kampar Berdasarkan Kontribusi PDRB Per Sektor, Tahun 2000 - 2008 berdasarkan ADH Konstan 2000

Sumber : BPS dan Bappeda Kabupaten Kampar, PDRB Kabupaten Kampar, beberapa edisi, diolah.

Keterangan :

- Sektor 1 = Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan
- Sektor 2 = Pertambangan dan Penggalian
- Sektor 3 = Industri Pengolahan
- Sektor 4 = Listrik, Gas dan Air Bersih
- Sektor 5 = Bangunan
- Sektor 6 = Perdagangan, Hotel dan Restoran
- Sektor 7 = Angkutan dan Komunikasi
- Sektor 8 = Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan
- Sektor 9 = Jasa-jasa

Ditinjau dari aktifitas ekonomi di Kabupaten Kampar, memang keberadaan aktifitas pertambangan dan penggalian di daerah ini menjadi penggerak aktifitas ekonomi yang memiliki nilai LQ terbesar. Namun sektor pertanian yang juga merupakan sektor basis selain sektor tersebut diatas menjadi salah satu peluang bagi pihak investor untuk berperan dalam pengembangan aktifitas ekonomi masyarakat.

7. Kabupaten Rokan Hulu

Untuk kabupaten Rokan Hulu, hasil penghitungan nilai LQ dari data series PDRB perlapangan usaha berdasarkan harga konstan tahun 2000

pada periode tahun 2000 – 2008; yang menjadi sektor basis di daerah ini adalah Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan, kemudian sektor industri pengolahan hasil pertanian sebagai pendukung sektor pertanian dan sektor jasa-jasa mempunyai potensi yang cukup baik untuk dikembangkan dalam meningkatkan perekonomian wilayah sebagai pengembangan Kabupaten baru.

Rata-rata persentase kontribusi sektor ini dalam struktur perekonomian Kabupaten Rokan Hulu per sektor tahun 2000 – 2008 menunjukkan bahwa kontribusi sektor yang terbesar yaitu sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan, dan sektor penyumbang rata-rata terkecil adalah sektor Listrik gas dan Air bersih, sebagaimana yang terlihat pada Gambar 9.



Gambar 9 : Rata-rata Persentase Kontribusi Persektor pada PDRB Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2000 – 2008 berdasarkan ADH Konstan 2000.

Berdasarkan analisis sektor dalam struktur perekonomian yang ada dalam PDRB kabupaten Rokan Hulu, maka sektor yang menonjol peranannya secara dominan berdasarkan hasil analisis LQ adalah Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan. Kontribusi sektor tersebut dalam struktur perekonomian berdasarkan angka rata-rata pertahun sebagaimana telah digambarkan pada tabel sebelumnya.

Selanjutnya potensi ekonomi Kabupaten Rokan Hulu yang dilihat dari perhitungan nilai LQ terhadap rata-rata kontribusi PDRB Sektoral

selama periode tahun 2000-2004 adalah sebagaimana terlihat pada tabel 15.

Tabel 15 : Analisis Potensi (Sektor Basis) Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Kontribusi PDRB Per Sektor, Tahun 2000-2008 berdasarkan ADH Konstan 2000

Sumber : BPS dan Bappeda Kabupaten Rokan Hulu, PDRB Kabupaten Rokan Hulu, beberapa edisi, diolah.

Keterangan :

- Sektor 1 = Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan
- Sektor 2 = Pertambangan dan Penggalian
- Sektor 3 = Industri Pengolahan
- Sektor 4 = Listrik, Gas dan Air Bersih
- Sektor 5 = Bangunan
- Sektor 6 = Perdagangan, Hotel dan Restoran
- Sektor 7 = Angkutan dan Komunikasi
- Sektor 8 = Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan
- Sektor 9 = Jasa-jasa

Angka LQ untuk Sektor Pertanian yang merupakan sektor basis dan menjadi sektor yang potensial di daerah ini juga mempunyai kontribusi terbesar dalam struktur perekonomian Kabupaten Rokan Hulu selama periode 2000-2008 yang berkontribusi rata-rata sebesar 60,90 persen pertahun selama kurun waktu tersebut, dan selama 5 (lima) tahun terakhir sektor pertanian mengalami penurunan walaupun secara perlahan, karena adanya pergeseran ke sektor lainnya seperti sektor pertambangan dan penggalian dengan ditemukannya sumber-sumber kekayaan alam yang baru dan sektor jasa-jasa dengan berkembangnya ekonomi wilayah

tersebut serta sektor industri pengolahan yang mendukung sektor pertanian terutama tanaman perkebunan sawit.

Ditinjau dari aktifitas ekonomi di Kabupaten Rokan Hulu, memang Sektor Pertanian di daerah ini menjadi penggerak aktifitas ekonomi utama penduduknya, dan sektor pertanian yang juga merupakan sektor basis menjadi salah satu peluang bagi pihak investor untuk berperan dalam pengembangan aktifitas ekonomi masyarakat.

8. Kabupaten Rokan Hilir

Rata-rata persentase kontribusi masing-masing sektor dalam struktur perekonomian Kabupaten Rokan Hilir dari data *time series* PDRB per sektor tahun 2000-2008 menunjukkan bahwa kontribusi sektor yang terbesar berturut-turut yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor perdagangan hotel dan restoran; dan sektor penyumbang rata-rata terkecil adalah sektor listrik, gas dan air bersih, sebagaimana yang terlihat pada Gambar 10.



Gambar 10 : Rata-rata Persentase Kontribusi Persektor pada PDRB Kabupaten Rokan Hilir, Tahun 2000 – 2008 berdasarkan ADH Konstan 2000.

Selanjutnya berdasarkan analisis terhadap sektor dalam struktur perekonomian yang ada dalam PDRB Kabupaten Rokan Hilir, maka sektor yang menonjol peranannya secara berurut berdasarkan hasil

analisis LQ adalah Sektor Pertanian, Sektor Perdagangan Hotel dan Restoran, sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, Sektor Jasa-Jasa, Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih. Kontribusi sektor tersebut dalam struktur perekonomian berdasarkan angka rata-rata pertahun terlihat pada Tabel 16.

Tabel 16 : Analisis Potensi (Sektor Basis) Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Kontribusi PDRB Per Sektor, Tahun 2000 - 2008 berdasarkan ADH Konstan 2000

Sumber : BPS dan Bappeda Kabupaten Rokan Hilir, PDRB Kabupaten Rokan Hilir, beberapa edisi, diolah.

Keterangan :

- Sektor 1 = Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan
- Sektor 2 = Pertambangan dan Penggalian
- Sektor 3 = Industri Pengolahan
- Sektor 4 = Listrik, Gas dan Air Bersih
- Sektor 5 = Bangunan
- Sektor 6 = Perdagangan, Hotel dan Restoran
- Sektor 7 = Angkutan dan Komunikasi
- Sektor 8 = Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan
- Sektor 9 = Jasa-jasa

Dalam struktur perekonomian Kabupaten Rokan Hilir, peranan sektor Pertanian memang paling besar dan ternyata sektor ini juga menjadi sektor basis didaerah ini diikuti sektor Perdagangan Hotel dan Restoran.

9. Kabupaten Indragiri Hulu

Rata-rata persentase kontribusi masing-masing sektor dalam struktur perekonomian Kabupaten Indragiri Hulu dari data *time series* PDRB tahun 2000 – 2008 sebagaimana terlihat pada gambar 11.



Gambar 11 : Rata-rata Persentase Kontribusi Persektor pada PDRB Kabupaten Indragiri Hulu, Tahun 2000 – 2008 berdasarkan ADH Konstan 2000.

Dari Gambar diatas terlihat bahwa konstribusi sektor pertanian paling besar di daerah ini. Selanjutnya berdasarkan analisis terhadap sektor dalam struktur perekonomian yang ada dalam PDRB Kabupaten Indragiri Hulu tersebut, maka sektor yang menonjol peranannya secara berurut berdasarkan hasil analisis LQ adalah Sektor Pertanian dan Sektor Industri Pengolahan, dan hasil analisis potensi daerah berdasarkan LQ terlihat pada Tabel 17.

Tabel 17 : Analisis Potensi (Sektor Basis) Kabupaten Indragiri Hulu Berdasarkan Kontribusi PDRB Per Sektor, Tahun 2000 - 2008 berdasarkan ADH Konstan 2000

Sumber : BPS dan Bappeda Kabupaten Indragiri Hulu, PDRB Kabupaten Indragiri Hulu, beberapa edisi, diolah.

Keterangan :

Sektor 1 = Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan

Sektor 2 = Pertambangan dan Penggalian

Sektor 3 = Industri Pengolahan

Sektor 4 = Listrik, Gas dan Air Bersih

Sektor 5 = Bangunan

Sektor 6 = Perdagangan, Hotel dan Restoran

Sektor 7 = Angkutan dan Komunikasi

Sektor 8 = Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan

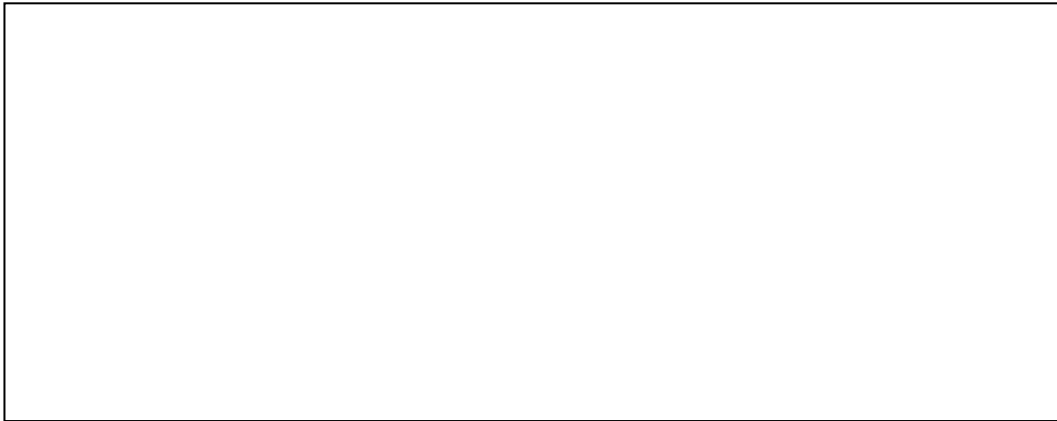
Sektor 9 = Jasa-jasa

Angka LQ untuk Pertanian paling besar dan juga memberikan kontribusi terbesar dalam struktur perekonomian Kabupaten Indragiri Hulu selama periode 2000-2008. Sektor (Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan) mengalami perlambatan dalam pertumbuhannya namun masih tetap memberikan kontribusi rata-rata terbesar yakni 50,52 persen pertahun selama kurun waktu tersebut, dan mengalami pergeseran ke sektor industri pengolahan yang mendukung sektor pertanian, khususnya perkebunan.

10. Kabupaten Indragiri Hilir

Selanjutnya, analisis terhadap sektor basis di kabupaten Indragiri Hilir yang dikenal dengan negeri seribu parit, menunjukkan bahwa rata-rata persentase kontribusi masing-masing sektor dalam struktur perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir dari data *time series* PDRB tahun

2000- 2008 berdasarkan harga konstan tahun 2000 adalah sebagaimana terlihat pada gambar 12.



Gambar 12 : Rata-rata Persentase Kontribusi Persektor pada PDRB Kabupaten Indragiri Hilir, Tahun 2000–2008 berdasarkan ADH Konstan 2000.

Dari Gambar diatas terlihat bahwa konstribusi sektor pertanian paling besar di daerah ini. Selanjutnya berdasarkan analisis terhadap sektor dalam struktur perekonomian yang ada dalam PDRB Kabupaten Indragiri Hilir tersebut, maka sektor yang menonjol peranannya sekaligus berdasarkan hasil analisis LQ adalah sektor Pertanian. Kontribusi sektor tersebut dalam struktur perekonomian dan hasil analisis potensi daerah berdasarkan LQ pada tablel 18.

Tabel 18 : Analisis Potensi (Sektor Basis) Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Kontribusi PDRB Per Sektor, Tahun 2000-2008 berdasarkan ADH Konstan 2000 (**)

Sumber : BPS dan Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir, PDRB Kabupaten Indragiri Hilir, beberapa edisi, diolah.

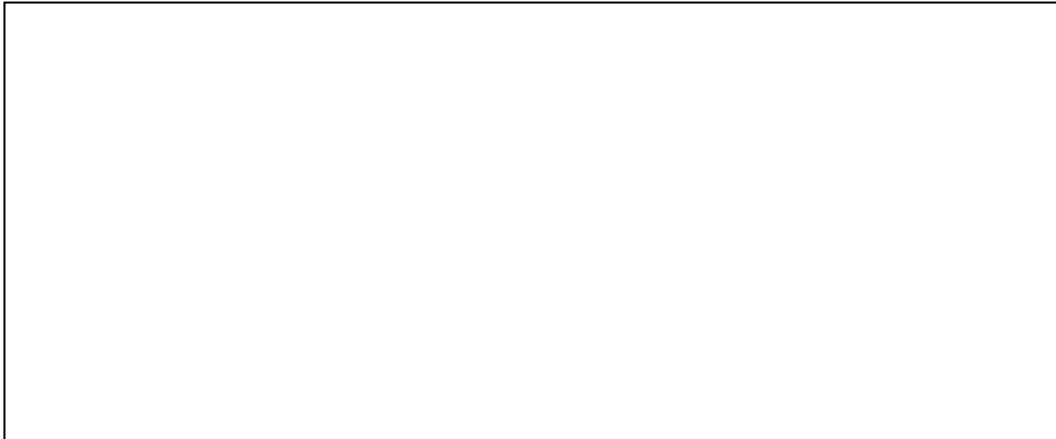
Keterangan :

- Sektor 1 = Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan
- Sektor 2 = Pertambangan dan Penggalian
- Sektor 3 = Industri Pengolahan
- Sektor 4 = Listrik, Gas dan Air Bersih
- Sektor 5 = Bangunan
- Sektor 6 = Perdagangan, Hotel dan Restoran
- Sektor 7 = Angkutan dan Komunikasi
- Sektor 8 = Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan
- Sektor 9 = Jasa-jasa

Angka LQ untuk Pertanian yang merupakan sektor basis, sejalan dengan kontribusi sektor ini yang terbesar dalam struktur perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir selama periode 2000-2008, dimana kontribusi rata-rata sektor ini adalah 49,56 persen, di samping sektor yang potensi untuk dikembangkan saat ini adalah sektor industri pengolahan yang memberikan kontribusi yang cukup besar yaitu rata-rata 16,49 persen dan mendukung sektor pertanian dengan sentra di Kabupaten Kateman.

11. Kabupaten Kuantan Singingi

Rata-rata persentase kontribusi masing-masing sektor dalam struktur perekonomian Kabupaten Kuantan Singingi dari data time series PDRB tahun 2000–2008 sebagaimana terlihat pada 13.



Gambar 13 : Rata-rata Persentase Kontribusi Persektor pada PDRB Kabupaten Kuantan Singingi, Tahun 2000–2008 berdasarkan ADH Konstan 2000.

Dari Gambar diatas terlihat bahwa sama dengan sebagian daerah Kabupaten lainnya (seperti Inhu, Inhil, Rohul, Rohil, dan Kampar) maka kontribusi sektor pertanian paling besar di daerah ini.

Selanjutnya berdasarkan analisis terhadap sektor dalam struktur perekonomian yang ada dalam PDRB Kabupaten Kuantan Singingi tersebut, maka sektor yang menonjol peranannya secara berurut berdasarkan hasil analisis LQ adalah Sektor Pertanian dan Sektor Pertambangan dan Penggalian. Potensi sumberdaya alam yang ada di kabupaten Kuantan Singingi antara lain adalah batubara yang potensial sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik.

Kontribusi sektor masing-masing sektor perekonomian tersebut dalam struktur perekonomian dan hasil analisis potensi daerah berdasarkan LQ pada Tabel 19.

Tabel 19 : Analisis Potensi (Sektor Basis) Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Kontribusi PDRB Per Sektor, Tahun 2000 - 2008 berdasarkan ADH Konstan 2000

Sumber : BPS dan Bappeda Kabupaten Kuantan Singingi, PDRB Kabupaten Kuantan Singingi, beberapa edisi, diolah.

Keterangan :

- Sektor 1 = Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan
- Sektor 2 = Pertambangan dan Penggalian
- Sektor 3 = Industri Pengolahan
- Sektor 4 = Listrik, Gas dan Air Bersih
- Sektor 5 = Bangunan
- Sektor 6 = Perdagangan, Hotel dan Restoran
- Sektor 7 = Angkutan dan Komunikasi
- Sektor 8 = Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan
- Sektor 9 = Jasa-jasa

Angka LQ untuk sektor Pertanian paling besar dan sejalan dengan kontribusi sektor ini yang juga terbesar dalam struktur perekonomian Kabupaten Kuantan Singingi selama periode 2000-2008, dimana kontribusi rata-rata sektor ini adalah 59,98 persen pertahun selama kurun waktu tersebut.

Sebagai gambaran tentang potensi setiap daerah kabupaten dan Kota, maka dapat dilihat rekapitulasi sektor basis dan non basis di 11 kabupaten dan Kota di Provinsi Riau pada table 20 berikut :

Tabel 23 : Sektor Basis/Non Basis 11 (sebelas) Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau Berdasarkan PDRB ADH Konstan 2000, Tahun 2000-2008.

No.	Kabupaten	Unggulan, Kontribusi Sektor Terhadap PDRB dan LQ								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pekanbaru	NON BASIS	NON BASIS	BASIS	BASIS	BASIS	BASIS	BASIS	BASIS	BASIS
2.	Dumai	NON BASIS	NON BASIS	NON BASIS	BASIS	BASIS	BASIS	BASIS	BASIS	BASIS
3.	Bengkalis	NON BASIS	NON BASIS	NON BASIS	BASIS	NON BASIS	BASIS	NON BASIS	BASIS	BASIS
4.	Siak	NON BASIS	NON BASIS	BASIS	NON BASIS	NON BASIS	NON BASIS	NON BASIS	NON BASIS	NON BASIS
5.	Rokan Hilir	BASIS	NON BASIS	NON BASIS	NON BASIS	NON BASIS	BASIS	NON BASIS	NON BASIS	NON BASIS
6.	Rokan Hulu	BASIS	NON BASIS	NON BASIS	NON BASIS	NON BASIS	NON BASIS	NON BASIS	NON BASIS	NON BASIS
7.	Indragiri Hulu	BASIS	NON BASIS	BASIS	NON BASIS	NON BASIS	NON BASIS	NON BASIS	NON BASIS	NON BASIS
8.	Indragiri Hilir	BASIS	NON BASIS	NON BASIS	NON BASIS	NON BASIS	NON BASIS	NON BASIS	NON BASIS	NON BASIS
9.	Kuantan Singingi	BASIS	BASIS	NON BASIS	NON BASIS	NON BASIS	NON BASIS	NON BASIS	NON BASIS	NON BASIS
10.	Kampar	BASIS	BASIS	NON BASIS	NON BASIS	NON BASIS	NON BASIS	NON BASIS	NON BASIS	NON BASIS
11.	Pelalawan	BASIS	NON BASIS	BASIS	NON BASIS	NON BASIS	NON BASIS	NON BASIS	NON BASIS	NON BASIS

G. PERKEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN DI KABUPATEN DAN KOTA PROVINSI RIAU

Hadirin yang saya hormati,

Gambaran tabel berikut menunjukkan sektor unggulan di masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Riau, yang merupakan sektor basis di Kabupaten dan Kota tersebut.

Kota Pekanbaru merupakan kota dengan unggulan di sektor perdagangan, Hotel dan Restoran, di sektor jasa, dan sektor bangunan. Kota Dumai unggulan di sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, di sektor Pengangkutan dan Komunikasi, serta sektor bangunan.

Kabupaten Bengkalis di sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, dan sektor jasa.

Kabupaten Siak unggul dengan sektor industri pengolahan bahan baku kertas, dan industri log. Sedangkan Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Inderagiri Hilir, Inderagiri Hulu, Kuantan Singingi, Kampar, dan Pelalawan unggul dengan sektor Pertanian, dengan sub sektor dan komoditi yang berbeda dan ada yang sama. Di Rokan Hilir dengan sub sektor perkebunan sawit, dan sub sektor tanaman pangan, Sementara Rokan Hulu juga perkebunan (sawit dan Karet), serta sub sektor peternakan yang sudah surplus dan mensuplai kabupaten dan Kota lainnya di Provinsi Riau,

Kabupaten Inderagiri Hilir juga di sub sektor perkebunan (kelapa, dan juga sawit yang baru dikembangkan), Inderagiri Hulu juga sub sektor perkebunan (karet, dan sawit) serta industri pengolahan dari agroindustri.

Kabupaten Kuantan Singingi dan Kampar mempunyai kesamaan unggul di sub sektor perkebunan (karet dan sawit) dan Kampar juga unggul di sub setor perikanan dan sektor pertambangan dan penggalian. Sedangkan Kabupaten Pelalawan juga di sub sektor perkebunan (sawit) dan industri

pengolahan terutam industri besar kehutanan dan sub sektor perikanan dan kehutanan.

H. PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PERUBAHAN STRUKTUR PEREKONOMIAN PROVINSI RIAU

Sebagaimana yang dikemukakan pada teori sebelumnya, intinya menjelaskan bahwa adanya keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita dengan perubahan struktur perekonomian suatu daerah (atau negara). Jika dilihat pada pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita di 11 (sebelas) kabupaten dan kota di Provinsi Riau selama beberapa tahun terakhir mengalami pergeseran, yakni mengalami peningkatan yang cukup signifikan yang dapat ditunjukkan pada Tabel 20.

Dari hal di atas dapat dilihat perubahan struktur perekonomian di 11(sebelas) kabupaten/kota di provinsi Riau dari berbasis pertanian yang dominan ke sektor industri manufaktur, dan jasa serta sektor lainnya. Artinya, perubahan struktur perekonomian juga terjadi di kabupaten dan kota di Provinsi Riau, sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita sebagai akibat dari adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal ini telah mendorong pulai menurunnya penduduk miskin dalam periode waktu tahun 2002-2008 dari 15,39 persen menjadi 10,63 persen.

Jumlah penduduk miskin tahun 2002 sebesar 635.000 orang turun menjadi 566.670 pada tahun 2008. Penurunan penduduk miskin terlihat cukup nyata di daeran pedesaan dibandingkan perkotaan. Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Selain mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijaksanaan

pembangunan juga sekaligus seyogianya mampu mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Pada periode tahun 2007-2008 misalnya; indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan menunjukkan kecenderungan menurun, masing-masing dari 1,63 menjadi 1,25 dan 0,40 menjadi 0,25. Angka-angka ini menggambarkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit sebagai adanya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi di provinsi Riau.

Tabel 24: Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Riau Menurut Daerah 2002-2009

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000)			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
2002	n.a	n.a	635,0	n.a	n.a	15,39
2003	n.a	n.a	660,7	n.a	n.a	14,97
2004	n.a	n.a	658,6	n.a	n.a	14,67
2005	199,9	400,5	600,4	8,26	16,82	12,51
2006	226,3	338,6	564,9	9,37	14,40	11,85
2007	246,4	328,1	574,5	9,53	12,90	11,20
2008	245,1	321,6	566,67	9,12	12,16	10,63
2009 (*)	225,6	301,9	527,49	8,04	10,93	9,48

Sumber : BPS, BAPPEDA diolah 2009

Tabel 25 : Sektor Unggulan Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Riau

No.	Kabupaten	Sektor Unggulan								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pekanbaru	1,93 NON BASIS	0,03 NON BASIS	11,61 BASIS	1,46 NON BASIS	Unggulan III 17,30 BASIS	Unggulan I 29,58 BASIS	14,67 BASIS	5,18 BASIS	Unggulan II 18,22 BASIS
2.	Dumai	7,20 NON BASIS	0,43 NON BASIS	Unggulan I 26,64 BASIS	0,66 BASIS	13,63 BASIS	Unggulan II 20,89 BASIS	Unggulan III 16,47 BASIS	1,66 NON BASIS	12,46 BASIS
3.	Bengkalis	Potensi 20,20 NON BASIS	Unggulan 36,79 BASIS	10,96 NON BASIS	0,43 NON BASIS	2,65 NON BASIS	18,39 NON BASIS	2,14 NON BASIS	1,27 NON BASIS	7,16 NON BASIS
4.	Siak	Potensi 22,03 NON BASIS	Unggulan I 35,81 BASIS	Unggulan II 33,68 BASIS	0,06 NON BASIS	0,54 NON BASIS	3,32 NON BASIS	1,09 NON BASIS	0,57 NON BASIS	2,83 NON BASIS
5.	Rokan Hilir	Potensi 39,24 NON BASIS	Unggulan 31,53 BASIS	6,59 NON BASIS	0,20 NON BASIS	0,55 NON BASIS	14,70 NON BASIS	1,85 NON BASIS	0,99 NON BASIS	4,35 NON BASIS
6.	Rokan Hulu	Unggulan I 60,90 BASIS	4,03 NON BASIS	5,56 NON BASIS	0,07 NON BASIS	Unggulan III 3,73 BASIS	5,23 NON BASIS	2,66 NON BASIS	1,55 BASIS	Unggulan II 8,60 BASIS
7.	Indragiri Hulu	Unggulan I 50,52 BASIS	3,44 NON BASIS	Unggulan II 19,01 BASIS	0,24 BASIS	5,30 BASIS	8,23 BASIS	3,85 BASIS	1,22 BASIS	Unggulan III 8,19 BASIS
8.	Indragiri Hilir	Unggulan I 49,56 BASIS	0,62 NON BASIS	Unggulan II 16,49 BASIS	0,10 NON BASIS	4,10 BASIS	Unggulan III 14,88 BASIS	2,96 BASIS	1,62 BASIS	9,68 BASIS
9.	Kuantan Singingi	Unggulan I 59,98 BASIS	4,90 NON BASIS	8,01 NON BASIS	0,20 NON BASIS	5,88 BASIS	Unggulan III 7,86 BASIS	2,28 NON BASIS	1,19 BASIS	Unggulan II 9,69 BASIS
10.	Kampar	Unggulan I 46,68 BASIS	Unggulan II 26,57 BASIS	6,07 NON BASIS	0,09 NON BASIS	3,45 NON BASIS	7,76 NON BASIS	2,45 NON BASIS	0,82 NON BASIS	6,13 NON BASIS
11.	Pelalawan	Unggulan I 56,53 BASIS	2,46 NON BASIS	Unggulan II 27,16 BASIS	0,13 NON BASIS	2,85 NON BASIS	3,20 NON BASIS	2,22 NON BASIS	Unggulan III 1,45 BASIS	4,01 NON BASIS

Keterangan : 1) Pertanian, 2) Pertambangan dan Penggalian, 3) Industri Pengolahan, 4) Listrik, Gas, Dan Air Minum, 5) Bangunan, 6) Perdagangan, Hotel dan Restoran, 7) Pengangkutan dan Komunikasi, 8) Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan, 9) Jasa-jasa

H. PENUTUP

Hadirin yang saya hormati,

Berdasarkan karakteristik provinsi Riau, sebahagian besar (70%) adalah wilayah darat, sejak lama sebagai penghasil Migas terbesar di Indonesia, namun mempunyai kecepatan yang relatif rendah terhadap perubahan struktur perekonomian daerah ini. Sebahagian besar Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau berbasis sektor Pertanian kecuali Siak, Dumai dan Pekanbaru. Sektor Pertanian yang dominan adalah sub-sektor perkebunan terutama : sawit, kelapa, karet dan perikanan darat serta argo industri.

Laju pertumbuhan perekonomian provinsi Riau mengalami pertumbuhan yang relatif cepat jika dibandingkan dengan perekonomian nasional hal ini di cerminkan oleh perkembangan produk domestik regional bruto (PDRB) sebagai akibat dari peningkatan pembentukan modal, perkembangan tenaga kerja dan perubahan teknologi yang terjadi dalam kondisi ketidakseimbangan. Pertumbuhan ekonomi ini juga disertai dengan berbagai upaya diversifikasi, baik melalui upaya pemerintah maupun masyarakat atau merupakan pengaruh dari keadaan internal dan eksternal. Artinya pertumbuhan ekonomi menyebabkan terjadinya pergeseran pola permintaan dan penawaran yang diikuti oleh perubahan penggunaan faktor produksi dan perkembangan teknologi berbagai sektor. Selama pertumbuhan ekonomi berlangsung, alokasi sumberdaya keberbagai sektor mengalami perubahan yang berbeda-beda. Hal ini menimbulkan pergeseran dalam pola permintaan dan penawaran yang menyebabkan perubahan struktur perekonomian walaupun dengan kecepatan yang perlahan.

Di Provinsi Riau telah terjadi pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur perekonomian yang relatif lambat dibandingkan dengan pertumbuhan dan perubahan struktur perekonomian nasional. Pada tahun awal pengamatan struktur perekonomian provinsi Riau adalah akrararis dengan

peran sektor pertanian yang sangat dominan kemudian tahun akhir pengamatan struktur perekonomian provinsi Riau telah berubah menjadi menuju proses industrialisasi dengan menurunnya peranan sektor pertanian dan meningkatnya sektor industri pengolahan terhadap PDRB. Di proyeksikan struktur perekonomian Provinsi Riau akan memasuki tahap semi industri pada tahun 2010 di mana peran sektor industri menjadi lebih besar dari 20 % terhadap PDRB.

Pada sisi lain tergambar pula bahwa perubahan struktur perekonomian ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi melalui perubahan pola permintaan dan pola penawaran. Tingginya laju pertumbuhan ekonomi sejalan dengan meningkatnya tingkat pendapatan perkapita. Oleh karena terdapatnya perbedaan percepatan pertumbuhan antara sektor pertanian dan industri. Disamping itu, terlihat adanya perubahan akumulasi, alokasi sumberdaya dan distribusi demografi dalam proses pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan perubahan struktur perekonomian provinsi Riau. Dibanding dengan pola normal Chenery dan Syrquin (1975) pola dan arah tahapan proses pertumbuhan ekonomi provinsi Riau sedikit berbeda. Perbedaan ini disebabkan karena perbedaannya variabel ekonomi dan sosial seperti perkembangan teknologi, sumber keuangan yang lebih luas dan kebijakan pemerintah yang terarah di samping keadaan tentang waktu yang diukur.

Tingginya laju pertumbuhan sektor industri khususnya industri manufaktur dalam proses industrialisasi di Provinsi Riau menyebabkan perubahan pola konsumsi masyarakat. Permintaan barang konsumsi pangan secara relatif menurun, sedangkan permintaan barang industri meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita (hukum Engel). Diduga faktor-faktor yang menyebabkan tingginya laju pertumbuhan sektor industri di Provinsi di Riau adalah besarnya PMA dan PMDN yang didominasi sektor industri, perkembangan teknologi industri yang relatif cepat perkembangan sektor

perhubungan dan pengangkutan yang relatif baik, kenaikan nilai tukar barang industri yang relatif cepat, kebijaksanaan substitusi impor dan tingginya tingkat keuntungan pada sektor industri.

Selain itu digambarkan pula bahwa dukungan sumberdaya alam yang besar akan memperlambat perubahan struktur perekonomian, khususnya pada tahap permulaan dari pembangunan ekonomi di Provinsi Riau tekanan pada perdagangan bebas dan keunggulan komparatif akan menyebabkan daerah yang memiliki dukungan kekayaan sumberdaya alam penting, menunda atau mempercepat perubahan struktural menurut pola normal Chenery dan Syrquin (1975).

Akhirnya saya sampaikan terima kasih atas perhatian hadirin yang kami hormati.

Wabillaahittaufiq wal hidayah

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh.

I. KEPUSTAKAAN

- BPS, 2005. Riau Dalam Angka 2004. Kerjasama Bappeda Provinsi Riau dan BPS, Pekanbaru
- , 2005. Statistik Perdagangan Luar Negeri Provinsi Riau Menurut Kabupaten/ Kota tahun 2003. BPS Provinsi Riau Pekanbaru.
- , 2005. Statistik Indonesia 2005/2006, BPS, Jakarta.
- Badan Promosi dan Investasi, 2005. Expose Proyek Jalan Tol Pekanbaru-Dumai, BPI Provinsi Riau Pekanbaru.
- Bank Indoensia, 2006. Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Provinsi Riau, Bank Indonesia Pekanbaru.
- , 2006. Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Propinsi Riau Tahun 2005, Bank Indonesia KBI Pekanbaru.

- Chenery, Holis & Moises Syrquin. 1975. *Patterns of Development, 1950-1970*. Oxford University Press.
- , 1989. *Structural Change and Development Policy*. Oxford University Press. International bank. Washington D.C.
- Clark, Collin. 1984. *Development Economics : The Early Year*. Dalam Gerald M Meier and Dudley Seers *Pioneers in Development*. The World Bank. Washington D.C.
- Hoover Edgar M. 1983. *The Location of economic Activity*, McGraw-Hill Book Company, New York.
- Glasson, John. 1977. *Pengantar Perencanaan Regional*. Terjemahan. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Isyandi, 1996, *Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Perubahan Struktur Perekonomian Jawa Barat Dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama (1969-1993)*, Disertasi, Universitas Padjadjaran,, Bandung
- , 2005. *Menggesa dan Gejolak Perekonomian Indonesia : Memasuki era Otonomi Daerah dan Globalisasi*, Unri Press Pekanbaru
- , 2005. *Dampak Makro Ekonomi Indonesia terhadap Daya Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Riil di Propinsi Riau*, Makalah ISEI, Jakarta.
- , 2005. *Perspektif Daerah Riau : Potensi, Peluang dan Tantangan dalam Memasuki Pasar Ekspor Negara Jepang, RRT dan Taiwan*, Makalah, Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional dan Disperindag Provinsi Riau, Pekanbaru.
- , 2006, *Pengembangan Industri Hilir Kelapa Sawit di Provinsi Riau*, Proceeding Paper, Bank Indonesia KBI Pekanbaru
- Isyandi dan Kawan-kawan, 2007, *Mapping Potensi Ekonomi Propinsi Riau dan Kepulauan Riau*, FE-Unri dan Bank Riau, Pekanbaru.
- Iwan Jaya Aziz, *Ilmu Ekonomi Regional dan beberapa Aplikasinya di Indonesia*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Kuznets, Simon. 1969. *Economic Growth and Structure : Selected Essay*. Indian Edition. Oxford & IBH Publishising Co. New Delhi.
- , 1966. *Modern Economic Growth*. Yale University Press. New York
- Lewis, W.A. 1954. *Economic Development with Unlimited Supplies of Labour*. The Mancherter School. Vol-XXII.
- , 1957. *The Theory of Economic Growth*. Allen & Unwin. London
- Kompas. 2004. *Enam Fokus Masalah Lintas Sektoral Harus Segera diatasi : Rekomendasi Kadin Indonesia ke Presiden ; Bisnis dan Investasi*, Kamis 28 Oktober 2004.

- Jhingan, ML. 1990. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Rajawali Pers, Jakarta
- Joyo Winoto, 2005. *Peranan Pembangunan Infrastruktur Dalam Menggerakkan Sektor Riil*, ISEI Jakarta.
- Muchtarudin Siregar, 1981. *Beberapa Masalah Ekonomi dan Management Pengangkutan*, Lembaga Penerbit FE-UI, Jakarta.
- Nurkse, R. 1953. *Problema of Capital Formation in Under Developed Countries*. Basil Blackwel. Oxford.
- Lincoln Arsyad, 1999. *Ekonomi Daerah : Pengantar Perencanaan dan Pembangunan*, BPFE Jakarta
- Richardson, H. W. 2001. *Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Regional (Terjemahan Paul Sihotang) Edisi Revisi*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indoensia, Jakarta.
- Robinson Tarigan. 2004, *Ekonomi Regional : Teori dan Aplikasi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Rostow, W. W. 1965. *Tahap-Tahap Pertumbuhan Ekonomi*. (terjemahan Paul Sihotang). Bratara. Jakarta.
- Riayadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah. 2005, *Perencanaan Pembangunan Daerah : Strategi Menggali potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Samuelson, Paul. A and Nordhaus William D. 1995. *Economis*. 15-th Edition International Edition. Mc-Graw-Hill Book Company, New York.
- Sadono Sukirno. 2006, *ekonomi Pembangunan : Proses Masalah dan Dasar Kebijakan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- , 2005, *Makro Ekonomi Modern : Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- , 1985, *Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembangunan Daerah*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Siebert, Horst. 1969. *Regional Economic Growth : Teory and Policy*. International Textbook Company. Pennsylvania.
- Suryana. 2000, *Ekonomi Pembangunan : Problematika dan Pendekatan*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Todaro, Michael. P. 1997. *Economic Development*. Sixth Edition. Longman Publisher, London
- Yotopoulos, Pan. A and Nugent, B. Jeffrey. 1976. *Economic of Development. Empirical Investigations*. Harper International Edition. Harper row, Publishers. New york.

J. CURICULUM VITAE

I. KETERANGAN DIRI :

1. NAMA : PROF. DR. H. B. ISYANDI, SE, M.Sc
NIP : 19570915 198603 1 006
2. TEMPAT/TGL. LAHIR : Tanjung Pinang, 15 September 1957
3. ALAMAT RUMAH : Jalan Hang Tuah – Kamp.Kelapa No.35
Rt-01 RW-06 Sukamulia Pekanbaru-28133
e-mail : hb_isyandi@yahoo.com
isyandi@unri.ac.id
Telp (0761) 40094 ; 885881,HP-0811752984
4. A. PEKERJAAN : Dosen Tetap FE-UNRI
B. PANGKAT/GOL : Guru Besar, Pembina Tingkat-I / IV-b
C. JABATAN : Pembantu Dekan-I Fakultas Ekonomi UNRI
D. ORGANISASI :
 - a) Sekretaris Badan Pengawas PDAM Tirta Siak Pekanbaru
 - b) Ketua Bidang Penelitian & Pembangunan ISEI cabang Pekanbaru
 - c) Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga ICMI Riau
 - d) Anggota Dewan Riset Propinsi Riau
 - e) Sekretaris TIM Advisory Pemerintah Kabupaten Siak
 - f) Anggota Dewan Produktivitas Provinsi Riau
 - g) Kepala Bidang Pengembangan SDM FOREK Provinsi Riau
 - h) Ketua Yayasan Haji Muhammad Yusuf -Pekanabru

II. RIWAYAT PENDIDIKAN :

1. Sekolah Dasar Negeri I di Tanjung Pinang, tahun 1971
2. Sekolah Menengah Tingkat Pertama Negeri II di Tanjung Pinang, tahun 1973
3. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Negeri XXV di Jakarta, tahun 1976
4. Fakultas Teknik (Jurusan Sipil) UKI - Jakarta (1977-1979)
5. Ijazah S1 Fakultas Ekonomi, Jurusan Ilmu Ekonomi UNRI, tahun 1984
6. Ijazah S2 Fakultas Pascasarjana UNPAD Bandung, tahun 1990, Bidang Kajian Utama Ilmu Ekonomi Pertanian
7. Ijazah S3 dari Fakultas Pascasarjana UNPAD Bandung, tahun 1996, Bidang Ilmu Ekonomi, spesialis *Ekonomi Pembangunan dan Regional*.

III. KURSUS DAN LATIHAN

1. Workshop On Fiscal Desentralization-I, March-2000, IRIS-USAID, Jakarta
2. Workshop On Fiscal Desentralization-II, June 2000, IRIS-USAID, Jakarta
3. Workshop On Structural Equation Modeling, Lisrel & Amos – Angkatan II, 11-13 Maret 2002, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Tahun 2002, Malang – Jawa Timur.
4. Workshop on Policies for Regional Economics Development in Desentralizing Era, FE-Univ. HKBP Nommensen- LPEM FE-UI – IRIS, 14-16 May 2002, Medan
5. Workshop Nasional : Kurikulum Berbasis Kompetensi, 8-9 Oktober 2004
6. Pelatihan Pembekalan Program Nasional : Sistem Penataan Ruang Nasional dan Pengelolaan Tata Ruang Pesisir dan Laut Pasca Tsunami, 13-19 September 2006
7. Pelatihan Pembelajaran Inovatif Dalam Mata Kuliah Ekonomi Bagi Dosen PTN/PTS Se-Jawa, Bali dan Sumatera, di Bogor 23-29 juli 2006 (48 jam), Dirjen Dikti Depdiknas, 2006
8. Pelatihan Program Edukasi Pasar Modal : Tingkat Basic, Tahun 2007
9. Sertifikat Magang : Manajemen Sumber Daya Manusia/ Analisis Perilaku Karyawan, Semester II 2006/2007 selama 1 bulan di Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2007
10. Workshop Program Development ISS-MIS TPSPD UNRI, UPT-Puskom, 28 Februari-1 Maret 2007
11. Workshop Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, Biro Kepegawaian Depdiknas, 25-26 Juli 2007
12. ESQ Leadership Training, angkatan 62, 17-19 Agustus 2007, ESQ Leadership Center Jakarta.
13. Workshop : Local Economic Resources Development, Mei-Juni 2009, International Japan University Japan (IUJ), Nigatha, Jepang.

IV. RIWAYAT PEKERJAAN

1. Pengalaman Mengajar

1985-sekarang	: Dosen Tetap pada FE-UNRI di Pekanbaru
1985.1987	: Dosen Luar Biasa pada FE-UNILAK Riau
1991-1996	: Dosen Luar Biasa pada FE-UNPAS Bandung
1990-1996	: Dosen Luar Biasa pada STIE Pasundan Bandung
1991.1995	: Dosen Luar Biasa pada AKPI Bandung
1995- 1996	: Dosen Luar Biasa pada STIE YPKP Bandung
1997.1998	: Dosen Luar Biasa FE-UIR di Pekanbaru
1997-1998	: Dosen Luar Biasa FE-Univ.Lancang Kuning
1996-sekarang	: Dosen Tetap pada Magister Manajemen -UNRI
1997- 2006	: Dosen Luar Biasa Magister Manajemen UHAMKA
2000-2001	: Dosen Luar Biasa Magister Manajemen Muhammadiyah Jakarta,

2000-2007	: Dosen Luar Biasa STIE Sri Gemilang Tembilahan
2000-sekarang	: Dosen Luar Biasa STIE Bangkinang
2001-2007	: Dosen Luar Biasa Magister Teknik Studi Pembangunan ITB-UNRI
2001-sekarang	: Dosen Luar Biasa Magister Manajemen Pendidikan Univ. Negeri Jakarta-Univ.Riau
2002-2005	: Dosen Luar Biasa Program MM-UNSRI Palembang
2002-2005	: Dosen Luar Biasa Program Pascasarjana UNAND.
2001-sekarang	: Instruktur pada Badan Administrasi dan Pendidikan Latihan Pegawai Pemprov. Riau, Pekanbaru .
2001-2006	: Instruktur pada Pelatihan Metodologi Penelitian Dosen Universitas Riau, Lemlit-UNRI, 5-10 Agustus 2002, Pekanbaru
2008-sekarang	:Dosen Luar Biasa pada Universitas Islam Indragiri, Tembilahan
2008-sekarang	:Dosen Luar Biasa pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri, IPDN Jatinangor, Kampus Pekanbaru.

2. Pengalaman Administrasi

- 1987-1984, Staf administrasi siaran pada RRI stasiun Pekanbaru
- 1985-1987, Pelaksanaan Harian Pembantu Dekan-I / Kepala Tata Usaha Fakultas Ekonomi Lancang Kuning Pekanbaru.
- 1996-2002, Sekretaris Pelaksana pada Program Magister Mamajemen UNPAD-UNRI di Pekanbaru,
- 2001-sekarang, Pembantu Dekan-I Fakultas Ekonomi UNRI.
- 2002 (tigabulan) Pejabat DEKAN Fakultas Ekonomi UNRI.

V. BUKU/ PUBLIKASI YANG DITERBITKAN

1. Analisis Perekonomian Daerah Riau (1999) : CPIS Jakarta
2. Analisis Kebijakan Pengembangan Koperasi Daerah Riau (2000) ; CPIS Jakarta
3. Visi dan Produktivitas Masyarakat dalam Pembangunan, (1999), Pusat Kajian Dinamika Pembangunan Universitas Riau, Pekanbaru
4. Teori Ekonomi Mikro : Diktat Kuliah, (2001). Laboratorium Ekonomi Regional Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Pekanbaru
5. Teori Ekonomi Internasional : Diktat Kuliah, (2001). Laboratorium Ekonomi Regional Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Pekanbaru.
6. PengantarTeori Ekonomi Regional, (sedang proses), Rajawali Pers, Jakarta
7. Manajemen Sumberdaya Manusia : Dalam Perspektif Global (2004), Unri Press, Pekanbaru.
8. Menggesa dan Gejolak Perekonomian Indonesia : Memasuki Era Otonomi Daerah dan Globalisasi , (2005), Unri Press, Pekanbaru.